



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka birokrasi dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat;
- b. bahwa *Smart City* merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Smart City* adalah konsep pengelolaan kota berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.
6. *Smart Governance* adalah tata kelola kota cerdas, yang menyoroti bidang tata kelola di lingkungan pemerintahan daerah sebagai institusi yang melakukan layanan publik dan internal birokrasi sehingga menghasilkan terciptanya akuntabilitas layanan pemerintahan dari hasil dilakukannya proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan dengan semangat melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
7. *Smart Environment* adalah suatu proses pembangunan cerdas yang dapat menjamin keberlanjutan kondisi lingkungan, serta hubungannya antara lingkungan dengan aspek lain seperti ekonomi, pemerintahan, sosial, *living* dan *branding*.

8. *Smart Society* adalah suatu proses/upaya untuk menempatkan sumber daya manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.
9. *Smart Economy* adalah suatu langkah/proses pembangunan mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat Daerah yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan.
10. *Smart Living* adalah suatu upaya untuk menjamin kelayakan hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang pada suatu daerah.
11. *Smart Branding* adalah insiatif untuk melakukan *branding* daerah secara cerdas melalui penciptaan inovasi dalam memasarkan Daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah daerah.
12. Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Masterplan *Smart City* Daerah adalah acuan resmi dalam pengembangan dan pembangunan *Smart City* di Kabupaten Buton.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan Daerah dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik, pengelolaan lingkungan sehat dan bersih, peningkatan ekonomi, ketersediaan infrastruktur serta berbagai layanan lainnya guna meningkatkan kualitas hidup warganya, yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Daerah yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.

Pasal 3

Penyusunan Masterplan *Smart City* Daerah bertujuan untuk:

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan *Smart City* di suatu kawasan;

- b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah berdasarkan konsep *Smart City*;
- c. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam dokumen perencanaan *Smart City* Daerah;
- d. mendorong proses pengembangan kawasan cerdas yang maju, mandiri dan berdaya saing sebagai roh *Smart City* Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, inklusif dan partisipatif.

BAB II MASTERPLAN *SMART CITY* DAERAH

Pasal 4

- (1) Masterplan *Smart City* Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH;
 - BAB III : STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*;
 - BAB IV : RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH;
 - BAB V : PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH;
 - BAB VI : PENUTUP.
- (2) Rincian Masterplan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III VISI DAN MISI *SMART CITY* DAERAH

Pasal 6

- (1) Visi dan Misi *Smart City* Daerah mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni “Terwujudnya Buton sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan”.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan;
 - c. pelestarian dan pengembangan nilai dan aset budaya; dan
 - d. reformasi birokrasi.

BAB V DIMENSI *SMART CITY*

Pasal 7

Perumusan Strategi *Smart City* Daerah dijabarkan berdasarkan pilar dan sub pilar yang terdiri dari 6 (enam) dimensi meliputi:

- a. *smart governance*;
- b. *smart branding*;
- c. *smart economy*;
- d. *smart living*;
- e. *smart society*; dan
- f. *smart environment*.

BAB VI RENCANA *SMART CITY*

Pasal 8

- (1) Dimensi *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Masterplan *Smart City* Daerah.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 5 (lima) tahun sesuai Masterplan *Smart City* Daerah adalah tahapan rencana kerja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan *Smart City* Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan *Smart City* Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika melakukan pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan *Smart City* Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas pelaksanaan program *Smart City* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 18 September 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

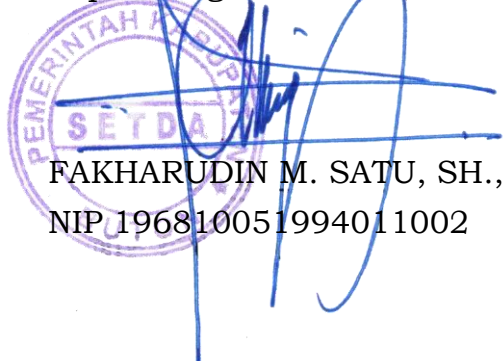
ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 478

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



FAKHARUDIN M. SATU, SH., MH

NIP.196810051994011002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
MASTERPLAN *SMART CITY*
KABUPATEN BUTON

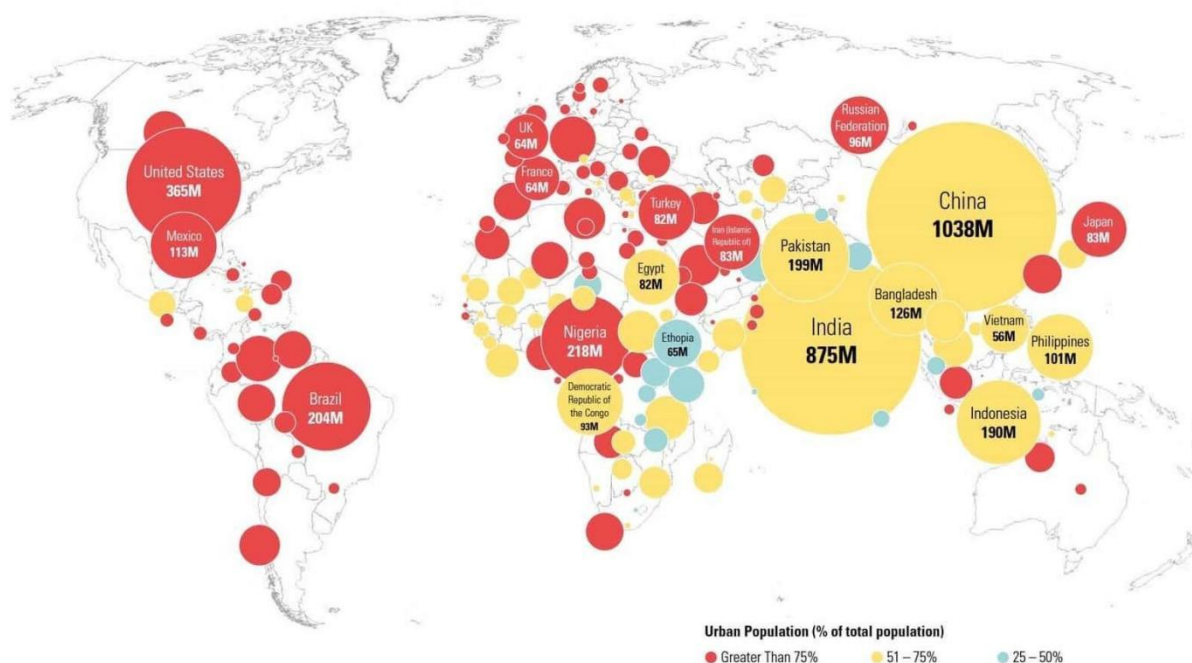
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2045, diperkirakan sebanyak 82,37% penduduk Indonesia hidup di kota. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah konsep kota pintar yang dapat memberikan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Menurut divisi populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 2004), populasi dunia adalah sekitar 1,65 miliar pada akhir abad ke-19 dan melampaui angka 6 miliar pada akhir abad ke-20. Kontribusi besar bidang bijak terhadap populasi dunia menunjukkan Asia sebagai kontributor teratas dengan 57,4 persen pada tahun 1900 hingga 60,8 persen pada tahun 1999 diikuti oleh Eropa. Pada awal 2014, populasi dunia diperkirakan sebesar 7,2 miliar, dengan sekitar 82 juta ditambahkan setiap tahun sesudahnya (UN, 2014). Dengan tingkat urbanisasi saat ini sebesar 32 persen, Jakarta baru (dengan populasi 30,53 juta) diperkirakan akan muncul setiap tahun (Demographia, 2015). Populasi Afrika diperkirakan tiga kali populasi Eropa pada tahun 2050; meningkatnya tingkat populasi perkotaan versus pedesaan adalah tanda-tanda perubahan lanskap distribusi populasi di seluruh dunia (PBB, 2014).

Secara historis migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan dan, oleh karena itu, proses mendefinisikan kembali batas-batas pinggiran kota-kota untuk memperluas wilayah kota memainkan peran kunci dalam menentukan populasi kota. Di dunia sekarang ini, peningkatan alami diharapkan memberi kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan populasi perkotaan daripada migrasi internal di banyak wilayah. Transformasi kota ini telah menjadi aspek utama, jika bukan pendorong, pembangunan ekonomi dan mereka menghadirkan kasus kota sebagai titik fokus

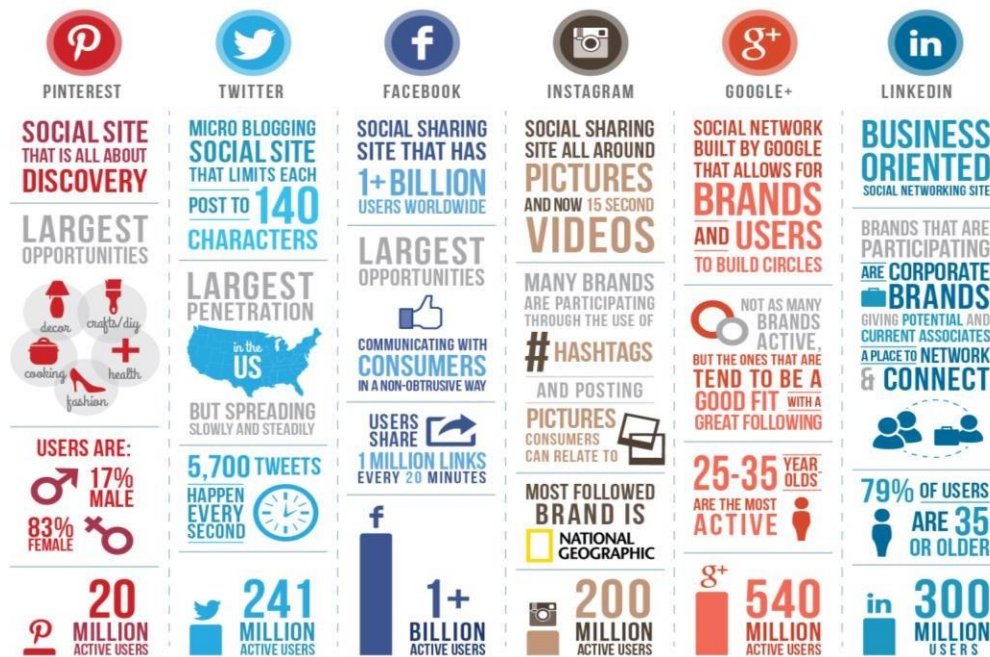
pertumbuhan ekonomi. Rata-rata, penduduk perkotaan memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan serta layanan dasar lainnya seperti air bersih, sanitasi dan transportasi daripada penduduk pedesaan. Kota-kota juga merupakan pusat utama konsumsi sumber daya (UN, 2011). Saat ini, wilayah perkotaan secara kasar menempati 3 persen permukaan planet dan, mengonsumsi 75 persen energi primer global; mereka mengeluarkan antara 50 dan 60 persen dari total gas rumah kaca di dunia (Editor 2014; UN, 2015).



Sumber: UN, 2015

Gambar 1. Sebaran Populasi Penduduk di Dunia

Perkembangan teknologi informasi di dunia sangatlah masif dengan berbagai inovasi yang mencuat dari kalangan generasi. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, penetrasi perangkat digital di Indonesia berkembang pesat sebagaimana tercatat bahwa 88,1 juta penduduk Indonesia telah mengakses Internet atau mencapai 34%. Dari pengguna Internet tersebut, 64,1 Juta penduduk mengakses melalui mobile phone . Jumlah tersebut akan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kemantapan infrastruktur jaringan Internet di seluruh wilayah didukung antusiasme industri telekomunikasi dan digital untuk melakukan pengembangan usahanya. Perkembangan jaringan Internet ini memberikan kanal- kanal interaksi yang beragam dimana masyarakat Indonesia menjadi salah satu penerima manfaat atau pengguna terbesar di dunia.



Gambar 2 Pengguna Media Sosial di Dunia

Penetrasi jaringan Internet yang semakin meluas memunculkan era baru digital dengan grand scenario berupa tren *Internet of Things (IoT)*. Dalam pemanfaatan Internet, Populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan Internet sepanjang 2017, menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Mayoritas pengguna Internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Melalui skenario IoT, pemanfaatan jaringan Internet akan dieksploitasi secara komprehensif melalui pengembangan suatu obyek, sensor, dan perangkat meskipun bukan komputer untuk beraktivitas dengan meminimalkan interaksi manusia. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi (*ubiquitous connectivity*), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (*computing economics*), teknologi miniatur (*miniaturization*), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (*cloud computing*). Inisiasi teknologi informasi yang dalam kehidupan manusia telah mendorong entitas Negara untuk membentuk peradaban baru yang mengintegrasikan digitalisasi baru sebagai suatu modernitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas. Perbaikan di setiap fungsi adalah guratan tegas untuk mewujudkan Indonesia *Smart Nation*.

Agar urbanisasi terus menawarkan peluang penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial, urbanisasi perlu dikelola dengan baik. Namun, kecepatan dan skala urbanisasi di daerah berkembang menantang kapasitas pemerintah untuk merencanakan dan memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang jumlahnya terus meningkat. Seiring pertumbuhan kota, pengelolaannya menjadi lebih kompleks dan populasinya menjadi lebih beragam. Negara-negara berkembang perlu menyesuaikan diri dengan proses ini jauh lebih cepat daripada negara-negara maju di masa lalu (UN, 2011). Hal ini, bersama dengan meningkatnya tingkat aspirasi masyarakat perkotaan untuk kualitas hidup dan layanan yang lebih baik, telah memaksa para pemangku kepentingan kota untuk mempertimbangkan perubahan dalam model pengelolaan sumber daya dan infrastruktur untuk kota-kota dan merespons dengan praktik-praktik inovatif dan solusi yang dapat diskalakan (Laartz & Lulf, 2014). Ini adalah beberapa pendorong utama untuk pengembangan Kota Cerdas. *Smart City* merupakan sebuah konsep pengembangan perkotaan dengan mengimplementasikan kemajuan teknologi sehingga memungkinkan adanya interaksi antara pemerintah dengan warganya.



Gambar 3. Dimensi Kematangan *Smart City*

Smart City atau 'Kota Cerdas' bertujuan untuk mengurangi tantangan yang dihadapi kota-kota, seperti kelangkaan sumber daya energi, layanan kesehatan, perumahan, air, dan infrastruktur yang memburuk (jalan, sekolah, dan transportasi).

Mereka juga menderita ketidakstabilan harga, perubahan iklim, dan permintaan untuk peluang ekonomi dan manfaat sosial yang lebih baik (Washburn et al, 2010). Kemajuan terbaru dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), selaras dengan pengurangan biaya teknologi, seperti aplikasi seluler murah, media sosial gratis, komputasi awan, dan cara hemat biaya untuk menangani data volume tinggi, memberi kota peluang dan alat yang lebih baik untuk memahami, berkomunikasi, dan memprediksi fungsi perkotaan (Susanne Dirks dan Mary Keeling, 2009; Berst et al., 2013).

Dalam konteks ini, membangun *Smart City* adalah suatu bentuk upaya untuk dapat mewujudkan ekosistem daerah yang lebih layak tinggal dengan kultur daerah yang kreatif, memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan serta dengan ciri khas memanfaatkan teknologi. Negara hadir untuk melayani, memberdayakan, dan membangun warga negara. Di Indonesia, beberapa kota besar sudah mulai mengadopsi konsep *Smart City*. Selain dari pihak pemerintah, pihak swasta juga ikut berpartisipasi membantu mewujudkan konsep *Smart City* di Indonesia.

Smart City merupakan wilayah perkotaan yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Implementasi *Smart City* di Indonesia sendiri mengalami berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Ciri khas pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam perbaikan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mewujudkan Kota yang Cerdas. Sebagaimana *Cities in Motion Index* yang dirilis oleh IESE pada tahun 2016 berbasis penilaian terhadap 77 indikator yang mencakup 10 dimensi dalam tata kelola perkotaan meliputi ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, kohesi sosial, jangkauan internasional, lingkungan, mobilitas dan transportasi, perencanaan

perkotaan, manajemen publik serta tata kelola pemerintahan, yang mana menempatkan Indonesia (Jakarta) di peringkat 170 jauh tertinggal dari Singapura (22), Bangkok (84), dan Kuala Lumpur (88).

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka mengakselerasi pembangunan *Smart City* di Indonesia, pada tahun 2017, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Gerakan ini kemudian dilanjutkan melalui program Gerakan *Smart City* Nasional yang pada tahun 2021 menyoar kabupaten/kota yang berada dalam Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) dan Ibu Kota Negara (IKN), dimana Kabupaten Buton menjadi salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari kawasan pariwisata Wakatobi, dan oleh sebab itu menerima penugasan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan *Smart City* Daerah.

Pengembangan Buton *Smart City* didukung melalui perumusan *roadmap* atau peta jalan pembangunan *Smart City* Kabupaten Buton dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang juga dilengkapi dengan perencanaan dan pelaksanaan “*Quick Win*” tahun 2020 Buton *Smart City*. Berlandaskan kesepahaman visi pembangunan nasional dan daerah didukung komitmen maka peta jalan pembangunan *Smart City* Kabupaten Buton dituangkan dalam sebuah dokumen Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton sebagai bagian perencanaan operasional yang merupakan penjabaran serta perluasan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton tahun 2017-2022. Menjelang masa berakhirnya pemerintahan Kabupaten Buton pada tahun 2022, maka Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton juga memiliki peran sebagai dokumen perencanaan operasional yang strategis dan dapat dimanfaatkan sebagai landasan atau pertimbangan penyusunan Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton tahun 2023-2027.

1.2. Tujuan

Tujuan umum perumusan Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton adalah untuk menjadi pedoman dalam pengembangan 6 (enam) dimensi *Smart City* meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*),

perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*) pada tahun 2022-2031.

Adapun tujuan teknis perumusan Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton secara khusus meliputi :

1. Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton adalah dokumen perencanaan operasional pengembangan *Smart City* yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton tahun 2017-2022;
2. Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton selaras dan memiliki kesinambungan dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya sesuai dengan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
3. Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton menjadi pedoman dalam perumusan Visi *Smart City*, *Quick Wins*, Peta Jalan, dan menentukan strategi serta rencana aksi *Smart City* di 6 dimensi periode tahun 2022-2031.

1.3. Landasan Hukum

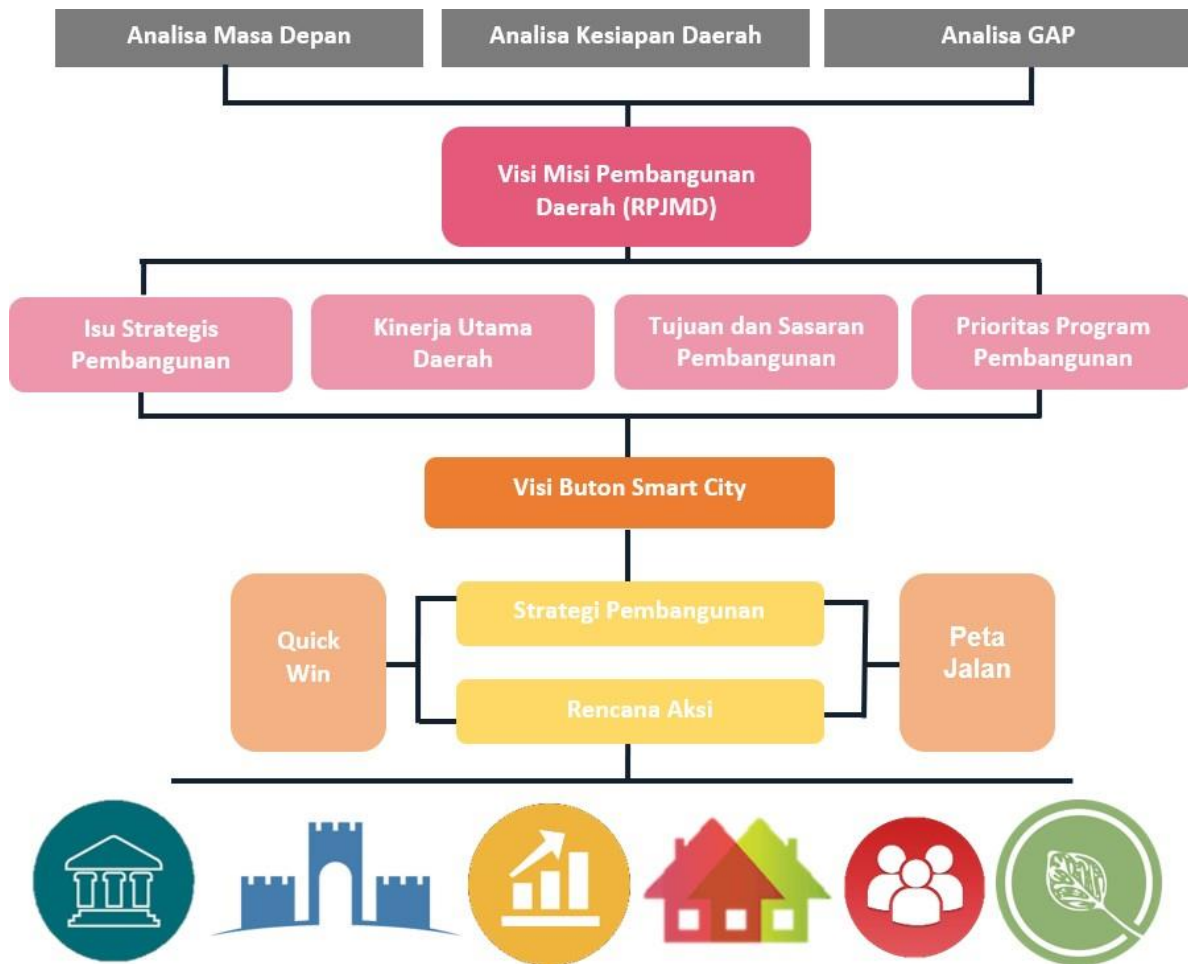
Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton, antara lain:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

1.4. Kerangka Pikir Masterplan *Smart City*

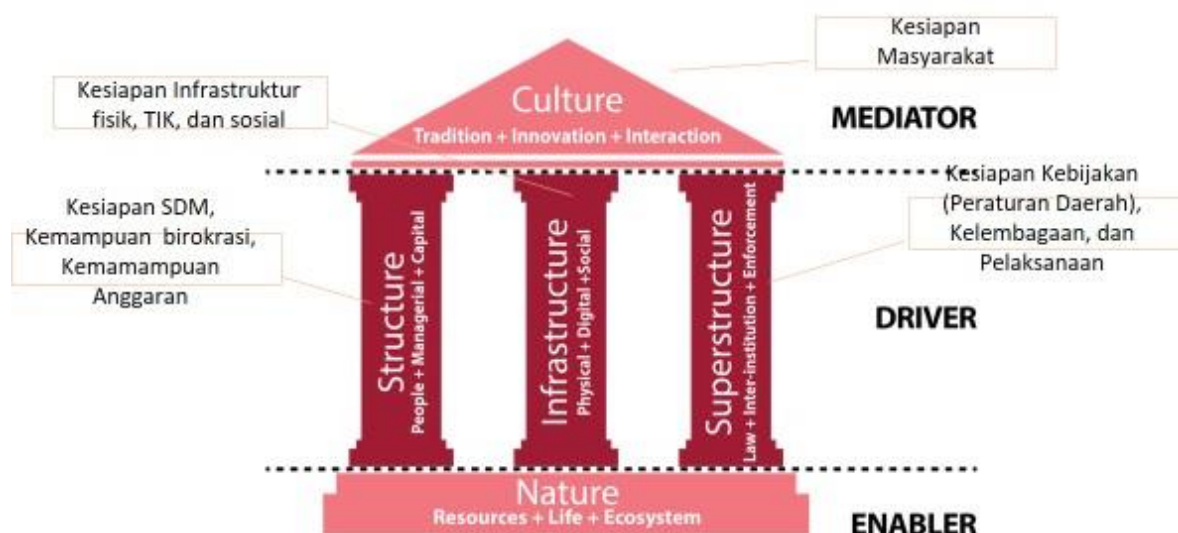
Dalam proses penyusunan dokumen Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton, dibutuhkan penggunaan sebuah kerangka pikir yang dapat menjadi acuan sehingga terwujud kesinambungan antara Masterplan *Smart City* selaku dokumen perencanaan operasional terhadap dokumen perencanaan lainnya dan juga standar pembangunan *Smart City* lainnya. Kerangka pikir penyusunan Masterplan *Smart City* menjadi sebuah konsep yang menghubungkan berbagai analisa pengembangan *Smart City*, dokumen RPJMD, berbagai indikator pembangunan lainnya serta standar implementasi *Smart City* dengan berbagai program pembangunan *Smart City* Daerah yang dituangkan dalam peta jalan di Masterplan *Smart City*.



Gambar 4. Kerangka Pikir Masterplan *Smart City*

Secara umum, kerangka pikir penyusunan Masterplan *Smart City* dan keterhubungannya dengan berbagai dokumen lainnya dapat dilihat pada Gambar X. Sebagaimana dapat dicermati pada gambar tersebut bahwa Masterplan *Smart City* yang pada substansinya merupakan penjabaran strategi, program, rencana aksi, dan *quick win* *Smart City* yang dituangkan dalam sebuah peta jalan pada dasarnya berasal dari proses analisa tren masa depan, kesiapan daerah dan juga kesenjangan yang kemudian berpijak pada berbagai rancangan dalam RPJMD disertai dengan informasi mengenai berbagai indikator pembangunan seperti misalnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Dengan demikian, mengacu pada diagram kerangka pikir tersebut, dapat dilihat bahwa dokumen Masterplan *Smart City* tidaklah berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dengan kesinambungan dengan dokumen perencanaan, isu strategis serta indikator kinerja pembangunan daerah lainnya.

Bagaimana Membangun Kesiapan Menjadi Smart City?



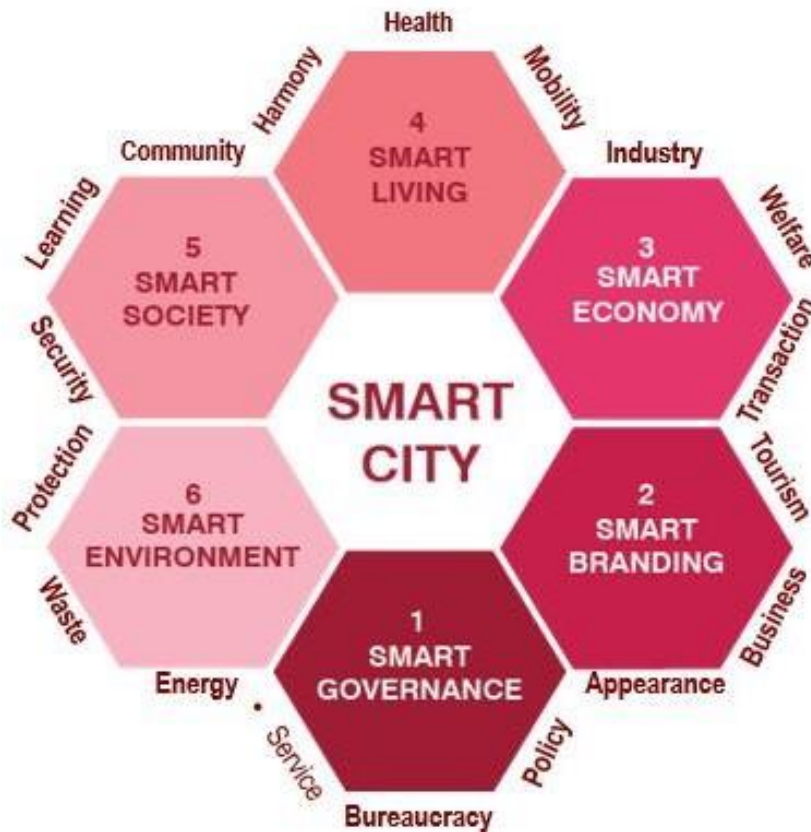
Gambar 5. Skema Kesiapan Daerah menuju *Smart City*

Sebagai titik masuk utama pembangunan *Smart City*, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis kesiapan daerah yang akan menjadi basis penetapan sasaran serta strategi dan juga berbagai program pembangunan *Smart City*. Dalam hal ini, elemen utama yang menjadi dasar analisis kesiapan daerah sehubungan dengan pembangunan *Smart City*, terdiri atas: potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan masterplan ini, kajian *Smart City* Readiness difokuskan pada 5(lima) elemen tersebut dan telah tertuang dalam Buku Analisis Strategis *Smart City* Daerah. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar

4. Adapun penjelasan mengenai 3 (tiga) pilar utama kesiapan daerah dalam pembangunan *Smart City* dijabarkan sebagai berikut:

- Struktur; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- Infrastruktur; pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;

- Suprastruktur; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

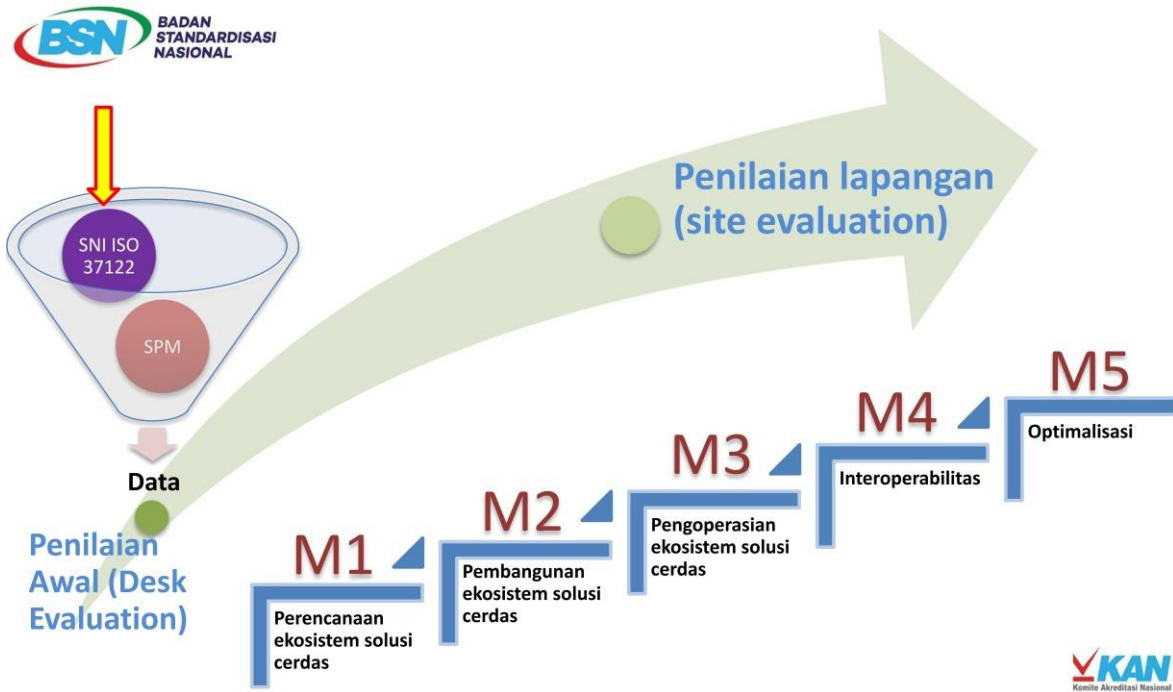


Gambar 6. Dimensi *Smart City*

Selanjutnya, konsep pembangunan *Smart City* sebuah daerah terbagi menjadi sekelompok dimensi yang menjadi elemen penunjang utama terwujudnya lingkungan yang liveable serta kualitas hidup dan layanan masyarakat yang baik. Keenam dimensi/aspek pembangunan *Smart City* Daerah kemudian diturunkan menjadi 18 (delapan belas) sub-dimensi, dimana terdiri dari 3 sub-dimensi pada tiap dimensinya sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.

Berkaitan dengan standar indikator yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kematangan implementasi *Smart City* di sebuah pemerintahan, pada tahun 2020 Badan Standarisasi Nasional (BSN), telah mengeluarkan SNI ISO 37122:2019 – Indikator Kota Cerdas yang merupakan adopsi langsung dari ISO 37122:2019 dan merupakan turunan dari ISO 37120:2018 – Indikator Kota Berkelanjutan. Dengan adanya SNI ISO 37122:2019, maka saat ini Indonesia telah memiliki standar yang baku khususnya yang berkaitan dengan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kematangan implementasi *Smart City* pada suatu wilayah. Oleh sebab itu, dalam penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton dipandang perlu untuk juga melakukan analisis terhadap berbagai Indikator Kota Cerdas pada SNI ISO 37122:2019 agar dapat diakomodir dan dicapai melalui berbagai program serta rencana aksi pembangunan *Smart City* khususnya di Kabupaten Buton. Peta keterhubungan antara

berbagai Indikator Kota Cerdas dalam SNI ISO 37122:2019 dengan sasaran pembangunan *Smart City* Daerah dituangkan pada Gambar X sebagai suatu kerangka pikir yang merepresentasikan keterhubungan antara peta jalan pembangunan *Smart City*, RPJMD dan juga ISO 37122:2019.



Gambar 7. Hubungan Indikator *Smart City* dalam SNI ISO37122:2019

Tabel 1. Indikator *Smart City* dalam SNI ISO ISO 37122:2019

No	Kelompok Indikator	No	Kelompok Indikator
1	5. Ekonomi	11	15. Keamanan
2	6. Pendidikan	12	16. Limbah Padat
3	7. Energi	13	17. Olah Raga dan Budaya
4	8. Lingkungan dan Perubahan Iklim	14	18. Telekomunikasi
5	9. Keuangan	15	19. Transportasi
6	10. Pemerintahan	16	20. Pertanian Perkotaan/Lokal dan Ketangguhan Pangan
7	11. Kesehatan		
8	12. Perumahan	17	21. Perencanaan Kota
9	13. Populasi dan Kondisi Sosial	18	22. Air Limbah
10	14. Rekreasi	19	23. Air

Sumber: SNI ISO37122:2019

Adapun banyaknya kelompok indikator *Smart City* pada SNI ISO 37122:2019 berjumlah 19 kelompok indikator yang kemudian dijabarkan lebih rinci menjadi 80 indikator. 19 kelompok indikator *Smart City* pada SNI ISO 37122:2019 ditampilkan pada Tabel 1. Secara umum, SNI ISO 37122:2019 memberikan informasi mengenai:

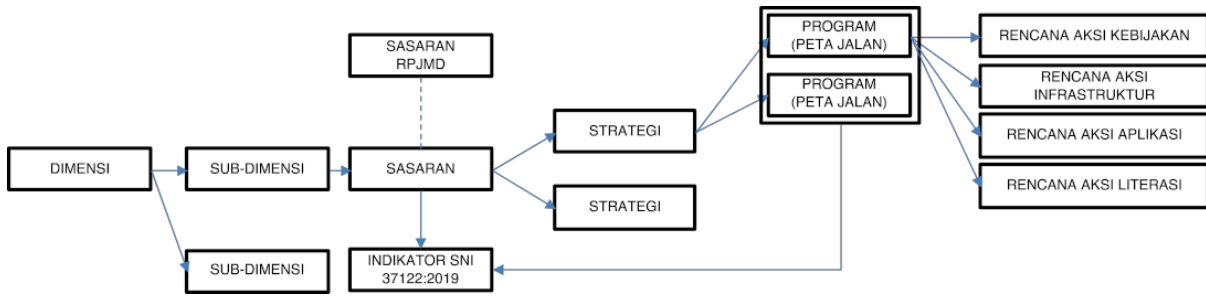
- Definisi indikator kota cerdas;
- Metodologi pengukuran untuk tiap indikator kota cerdas; dan
- Metodologi untuk melakukan pengumpulan, penyajian dan juga validasi data yang terkait dengan tiap indikator.

Beberapa kriteria pada indikator *Smart City* di dalam SNI ISO 37122:2019 dijabarkan sebagai berikut:

- Kelengkapan: indikator harus bisa mengukur dan menyeimbangkan semua aspek yang relevan untuk evaluasi kota cerdas.
- Teknologi netral: tidak memihak pada satu teknologi, yang ada saat ini atau di masa yang akan datang.
- Kesederhanaan: indikator dapat diungkapkan dan disajikan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti.
- Validitas: indikator merupakan cerminan akurat dari fakta dan data yang dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik ilmiah.
- Dapat diverifikasi: indikator dapat diverifikasi dan direproduksi. Metodologinya cukup ketat untuk memberikan kepastian pada tingkat implementasi kriteria.
- Ketersediaan: kualitas data tersedia, atau layak untuk memulai proses pemantauan yang aman dan andal yang akan membuatnya tersedia di masa depan.

Selain konsep kerang pikir penyusunan Masterplan *Smart City* secara umum yang menggambarkan keterhubungan antara Masterplan *Smart City* dengan berbagai analisis, RPJMD dan juga isu strategis serta indikator pembangunan lainnya, dalam hal

perumusan program dan rencana aksi pembangunan *Smart City* Daerah, juga digunakan kerangka pikir yang merupakan representasi keterhubungan antara 6 dimensi *Smart City*, 18 sub-dimensi *Smart City*, sasaran pembangunan *Smart City* dikaitkan dengan sasaran pembangunan pada RPJMD serta Indikator Kota Cerdas dalam SNI ISO 37122:2019 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 7.



Gambar 8. Skema Alur Analisis Masterplan *Smart City*

Dalam hal ini, Gambar 7 memperlihatkan bahwa berbagai rencana aksi dan program pembangunan *Smart City* Daerah yang dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk peta jalan pada dokumen Masterplan *Smart City*, memiliki akar berupa berbagai strategi pembangunan *Smart City* yang dirumuskan guna mencapai sasaran pembangunan *Smart City* yang telah ditetapkan pada tiap sub-dimensi. Adapun sasaran pembangunan *Smart City* itu sendiri dirumuskan berdasarkan analisa tren masa depan dan juga analisa kesenjangan seras melalui telaah sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buton tahun 2017-2022 dan juga dengan mengadopsi berbagai Indikator Kota Cerdas dalam SNI ISO 37122:2019.

Dengan demikian, berdasarkan kerang pemikiran tersebut dapat dipastikan bahwa berbagai program pembangunan dan rencana aksi *Smart City* Daerah sinkron dan juga memiliki kesinambungan baik terhadap sasaran pembangunan daerah dan pusat maupun standar implementasi *Smart City* pada skala global.

BAB II

ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH

2.1 Visi, Misi dan Sasaran *Smart City* Daerah

Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton merupakan salah satu bagian dari set dokumen perencanaan pembangunan *Smart City* pada jangka pendek, menengah dan panjang yang berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, khususnya dalam hal ini Kabupaten Buton untuk rentang waktu tahun 2022-2031 (masa perencanaan pembangunan *Smart City*). Selain diselaraskan dengan RPJMD, Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton juga sejalan dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya seperti *Road Map Sustainable Development Goals (SDG's)*, Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, *Roadmap Reformasi Birokrasi, Pro Poor Planning, Budgeting, and Monitoring*, dan rencana aksi lain dalam pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton menyentuh 6 (enam) dimensi pembangunan *Smart City* yang meliputi aspek tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kerangka pikir yang digunakan dalam penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton adalah dengan mengutamakan terbangunnya kesinambungan antara analisa masa depan, kesiapan daerah, dan kesenjangan atau gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan *Smart City Readiness* atau kesiapan daerah dalam mengimplementasikan konsep *smart city*. Kemudian, RPJMD Kabupaten Buton diposisikan sebagai pijakan untuk penyusunan arsitektur perencanaan pembangunan *smart city* yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan stategi serta prioritas program pembangunan. Pada tahap akhir, telaah arsitektur perencanaan strategis kemudian menjadi rumusan Visi *Smart City* Kabupaten Buton

yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan rencana aksi pada 6 (enam) dimensi *Smart City*, dimana juga dirumuskan berbagai program unggulan (*quick wins*) serta penetapan prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi dalam sebuah Peta Jalan.

Sebagai penelaahan terhadap perencanaan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buton 2017-2022 maka perlu dilakukan telaah kembali terhadap Visi Kabupaten Buton sebagaimana berikut ini:

**“TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN
BUDAYA TERDEPAN”**

Visi tersebut di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

- Visi Terwujudnya, mengandung makna upaya dan peran pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Buton yang berkeadilan, mengalokasikan dana pembangunan secara berimbang, mendistribusikan sumberdaya dan potensi daerah, penciptaan kesempatan kerja, kemudahan untuk berinvestasi di berbagai sektor dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buton.
- Visi Buton, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum, dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan di wilayah Kabupaten Buton.
- Kawasan Bisnis adalah suatu kondisi dimana adanya peningkatan investasi pengelolaan potensi daerah utamanya potensi aspal sebagai sektor utama dan potensi lainnya dengan pola pendekatan pembangunan berbasis kawasan serta terbentuknya perilaku masyarakat ke pemikiran yang produktif dalam memanfaatkan segala potensi yang ada dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dan kemampuan untuk mengakses sumber daya yang ada guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Simbolisasi dari suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dan kemampuan untuk mengakses sumber daya serta masyarakat mampu berdaya saing yang terstruktur, saling terkait untuk menghasilkan produk atau layanan

(demi meraih tujuan tertentu) yang masing- masing memiliki atribut sendiri tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya.

- Kawasan Budaya adalah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pengguna budaya dan menjadi panutan dan tradisi masyarakat sebagai pembeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Merupakan simbolisasi dari kebesaran nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhur (Martabat Kesultanan Buton). Nilai budaya dan aset budaya tetap terpelihara dan menjadi nilai yang terlembagakan dalam perilaku pemerintahan yang bersih dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan potensi budaya sebagai roda penggerak ekonomi daerah.
- Terdepan adalah simbolisasi daerah andalan dan sebagai kawasan ujung tombak. Buton sebagai daerah terdepan dalam pengembangan potensi daerah baik potensi alam maupun potensi budaya.

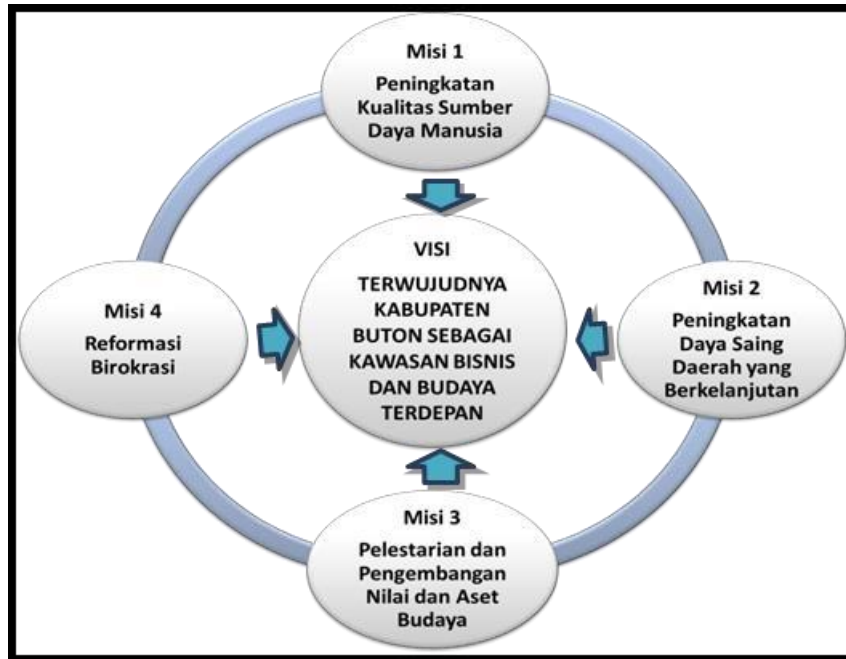
Berdasarkan pernyataan diatas, makna dari Visi Kabupaten Buton adalah Kabupaten Buton ingin mewujudkan daerah yang menyejahterakan masyarakat melalui perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang (bisnis) disertai dan didukung oleh nilai-nilai budaya yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. Dengan masyarakat yang sejahtera maka akan menjadikan Buton sebagai kawasan terdepan yang handal dan menjadi andalan dalam pembangunan seluruh sektor. Dengan demikian akan tercipta daerah yang mandiri, handal, tangguh dan nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buton.

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi **“TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN”**, dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Buton pada masa yang akan datang maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Buton, sebagai berikut:

1. Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang berumpu pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, kualitas iman dan takwa serta kualitas pengetahuan dan teknologi.

2. Misi 2: Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan, dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, dengan bertumpu pada:
 - a. Pembangunan infrastruktur kewilayahan;
 - b. Pembangunan infrastruktur pedesaan; dan
 - c. Pemanfaatan potensi daerah secara maksimal.
3. Misi 3: Pelestarian dan Pengembangan Nilai dan Aset Budaya, dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Buton dalam kebersamaan dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang ditanamkan oleh leluhur (Kesultanan Buton).
4. Misi 4: Reformasi Birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan kondisi pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui penerapan sistem pelayanan terpadu, efektif dan efisien, mendorong aparatur agar memiliki kompetensi, professional serta menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian visi mewujudkan Kabupaten Buton Sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan adalah mengandung makna terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi dan perubahan pola pikir ke arah yang produktif dalam memanfaatkan potensi alam dan potensi nilai dan aset budaya sebagai kekuatan yang mendorong peningkatan daya saing dengan dukungan pemerintahan yang bersih dan profesional.



Gambar 9. Gambaran Keterkaitan Visi dan Misi Masterplan *Smart city* Buton

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah, baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Pemetaan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buton tahun 2017-2022 terhadap dimensi *Smart City* dijabarkan pada tabel 2, sedangkan daftar sasaran pembangunan *Smart City* Kabupaten Buton tahun 2022-2031 dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buton tahun 2017-2022 terhadap dimensi *Smart City*

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi <i>Smart City</i>					
					<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Environment</i>
1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga	Angka harapan lama sekolah (tahun)				V		
				Rata-rata lama sekolah (tahun)				V		
				Jumlah pemuda yang berprestasi (orang)				V		
				Jumlah atlet berprestasi (orang)				V		
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)					V	
			Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan (%)			V			
				Pendapatan perkapita (rp)			V			
				Angka pengangguran (%)			V			

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi <i>Smart City</i>					
					<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Environment</i>
			Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Angka kriminalitas (%)					√	
			Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG)	Indeks pembangunan gender (%)				√		
2	Peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan			√			
				Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian			√			
				Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda montor			√			
				Jumlah kunjungan wisatawan (orang)		√				
			Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi (%)					√	
				Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)					√	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi <i>Smart City</i>					
					Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Society	Smart Living	Smart Environment
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur ekonomi dan wilayah yang merata	Persentase masyarakat yang menggunakan angkutan umum (%)					V	
			Meningkatnya ketersediaan kawasan ruang terbuka hijau	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB (%)					V	
3	Pelestarian dan pengembangan nilai dan asset budaya	Mewujudkan masyarakat Buton yang menghargai nilai-nilai budaya dan bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (buah)		V				V
4	Reformasi Birokrasi	Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab.	Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	Indeks kepuasan masyarakat (%)	V					
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK (opini)	V					
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Skor akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	V					

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun 202

Tabel 3. Hubungan Sasaran, Dasar Pemikiran dan Dimensi *Smart City*

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
<p><i>SMART GOVERNANCE</i></p>	<p>LAYANAN PUBLIK</p>	<p>1. Peningkatan kualitas layanan dokumen kependudukan yang mudah diakses masyarakat</p>	<p>1. Saat ini masih banyak layanan yang diberikan secara manual 2. Jauhnya jarak antara kantor OPD dengan Kecamatan dan Desa 3. Tingginya biaya transportasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan 4. Maish perlu ditingkatkannya kredibilitas data kependudukan</p>
	<p>BIROKRASI</p>	<p>1. Terwujudnya koorDinasi kerja dan juga pendistribusian kewenangan antara OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan</p>	<p>1. Masih kurang jelasnya pembagian kewenangan tugas antar OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan 2. Perlunya dilakukan pendistribusian kewenangan untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat</p>
	<p>PERANCANGAN KEBIJAKAN</p>	<p>1. Peningkatan tata Kelola pelayanan publik melalui penetapan berbagai peraturan perundangan mengenai protap pelayanan</p>	<p>1. Perlunya dilakukan penguatan koorDinasi antar Lembaga 2. Perlunya peningkatan kinerja OPD 3. Perlunya penguatan jaringan komunikasi dan koorDinasi antar OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan</p>
<p><i>SMART BRANDING</i></p>	<p>PARIWISATA</p>	<p>1. Mewujudkan Kab Buton sebagai destinasi wisata yang unggul</p>	<p>1. Adanya keberadaan berbagai destinasi wisata yang sangat potensial dan lengkap, mencakup wisata sejarah, alam, budaya dan laut</p>

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
	DAYA SAING BISNIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien 2. Meningkatkan partisipasi dan inovasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ditingkatkannya wawasan masyarakat eksternal terhadap potensi usaha dan wisata di Kab Buton 2. Masih rendahnya inovasi dan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan ekonomi kreatif
	WAJAH (TAMPILAN) KOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujud dan dilaksanakannya secara konsisten Perda tentang RTRW Kab Buton 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Perda tentang RTRW Kab Buton
<i>SMART ECONOMY</i>	EKOSISTEM INDUSTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing usaha dan persaingan usaha 2. Peningkatan kualitas produksi pangan lokal 3. Meningkatkan peran UMKM dalam pengelolaan produk lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya daya saing usaha lokal terhadap berbagai produk luar 2. Masih minimnya kualitas produksi lokal 3. Perlunya peningkatan peran UMKM dalam pengelolaan produk lokal
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kapasitas usaha lokal 2. Pengelolaan pangan lokal untuk membuka ksesempatan kerja 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya perluasan kesempatan kerja yang diawali dengan peningkatan kapasitas usaha lokal 2. Perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum di Kab Buton
	EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kemudahan akses kredit usaha bagi para pelaku UMKM 2. Penguatan kelompok usaha masyarakat dan juga koperasi dalam mendukung perekonomian daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih sulitnya pelaku usaha lokal mendapatkan bantuan/kredit modal usaha untuk pengembangan usahanya 2. Masih terbatasnya peran kelompok usaha masyarakat dan juga koperasi
<i>SMART LIVING</i>	HARMONISASI TATA RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan baru bagi rumah tidak layak huni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih cukup banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah kurang/tidak layak huni

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
		2. Meningkatkan kualitas Kawasan perumahan yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas yang memadai	2. Masih perlu ditingkatkannya kualitas sarana, prasarana dan utilitas di Kawasan perumahan
	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan Kesehatan 2. Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan 3. Meningkatnya jenis dan jumlah tenaga Kesehatan 4. Meningkatnya efektifitas hunian tempat tidur RS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum meratanya kualitas layanan Kesehatan di seluruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan 2. Masih terbatasnya jumlah dan jenis tenaga Kesehatan 3. Masih kurang efisiennya pemanfaatan hunian tempat tidur RS
	TRANSPORTASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya layanan sektor perhubungan atau transportasi 2. Tersedianya prasarana atau fasilitas perhubungan guna terwujudnya konektivitas antar wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kualitas dan cakupan layanan perhubungan, khususnya ketersediaan transportasi umum 2. Masih perlu ditingkatkannya kualitas prasarana yang menunjang konektivitas antar wilayah
<i>SMART SOCIETY</i>	INTERAKSI MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan komunitas seperti peduli lingkungan 2. Mengarahkan dana CSR pertambangan kepada program-program edukasi komunitas (perpustakaan, forum-forum edukasi) serta beasiswa 3. Penguatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan mengembangkan lembaga-lembaga adat, seni dan budaya 4. Klastering area pemukiman dan pertambangan/industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan non formal dari tingkat masyarakat akan memunculkan kreativitas dan mendorong peningkatan ekonomi 2. Sebagian dana CSR bisa dialokasikan untuk pembiayaan non fisik bagi kesejahteraan masyarakat 3. Hadirnya koneksi Internet akan menjadi katalis peningkatan literasi digital dan pencerdasan masyarakat

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Stabilitas harmoni beragama dalam masyarakat akan menjamin kondusivitas pembangunan 5. Perbedaan budaya yang mungkin dibawa oleh penduduk dari luar wilayah (khususnya pekerja tambang) harus dicermati agar tidak menimbulkan friksi dalam masyarakat
	EKOSISTEM BELAJAR/PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pendidikan vokasi (SMK & Politeknik) di bidang yang berpotensi membangun daerah (pariwisata, kesehatan, keguruan dan teknologi informasi) 2. Peningkatan jumlah penerima beasiswa (dari pemerintah daerah, Bidik Misi, Kerja sama dengan industri, dsb) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan daerah dalam sektor-sektor unggulan sebisa mungkin didukung oleh generasi muda dari internal yang penyiapannya membutuhkan pentahapan 2. Peningkatan kompetensi SDM generasi muda harus direncanakan dlm jangka waktu menengah (3-5 tahun)
	KEAMANAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem keamanan terpadu yang didukung TIK secara bertahap (kamera pengamat pada lokasi rawan, sistem pengaduan, sistem peringatan dini keamanan) 2. Penambahan jumlah tenaga penyuluh perlindungan perempuan dan anak 3. Penguatan koorDinasi dan kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan untuk menciptakan stabilitas keamanan kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan harus disikapi secara antisipatif dan mitigatif, sehingga penyiapan sistem dan perangkat pendukungnya merupakan keharusan 2. Kasus kekerasan pada anak cenderung meningkat 3. Keamanan yang kondusif merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan
<i>SMART ENVIRONMENT</i>	PROTEKSI LINGKUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan/usaha wajib, AMDAL, UKL, UPL dan SPPL 2. Meningkatnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya kerusakan lingkungan dampak dari kegiatan penambangan seperti keringnya mata air dan penyusutan daya dukung air

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
	PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dan limbah domestik	1. Banyak timbunan sampah yang belum tertangani akibat keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
	TATA KELOLA ENERGI	1. Pengembangan energi alternatif (green energy) yang ramah lingkungan seperti pemanfaatan limbah/sampah menjadi biogas	1. Belum terwujudnya kemampuan pengolahan sampah/limbah menjadi energi

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun 2021

Memperhatikan isu strategis baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, dan dengan mempertimbangkan kebijakan perencanaan jangka panjang, penelaahan visi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton tahun 2017-2022, dan penyelarasan dengan semangat yuridis, filosofis, serta sosiologis pembangunan Kabupaten Buton maka Visi Buton *Smart City* 2022-2031 disusun sebagai berikut:

***Visi Buton Smart City
2022-2031***

***“Terwujudnya Buton Yang SMART Sebagai Kawasan
Bisnis Dan Budaya Terdepan”***

Dalam hal ini, penambahan kata SMART yang merupakan akronim dari Sensing, Measuring, Analyzing, Respose, dan Thinking mewakili tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Buton yaitu mewujudkan pemerintahan yang mampu memahami kebutuhan masyarakat (sensing), mampu mengukur tingkat urgensi dari permasalahan yang ada (measuirng), mampu menganalisa untuk menentukan solusi (analyzing), mampu merespon secara efektif dan tepat waktu (response), dan mampu belajar dari pengalaman untuk mencegah timbulnya masalah yang sama (thinking).

2.2 Indikator Utama *Smart City* Daerah

Pada bab sebelumnya telah disampaikan bahwa dalam kerangka pikir yang digunakan, dokumen Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton terhubung dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya serta juga pada SNI ISO 37122:2019 yang mendefinisikan berbagai indikator untuk *Smart City*. Maka dari itu, dalam halnya penetapan indikator utama pembangunan *Smart City* Daerah, khususnya Kabupaten Buton, dilakukan melalui pendekatan kompilasi dari Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD, dan juga Indikator Kota Cerdas yang ada dalam SNI ISO 37122:2019.

Pada bagian ini, diuraikan berbagai indikator *Smart City* di tiap dimensi untuk pembangunan *Smart City* di Kabupaten Buton pada rentang waktu 2022-2031.

2.1.1 Indikator *Smart Governance*

Tabel 4. Indikator *Smart Governance*

DIMENSI	INDIKATOR	ACUAN/SUMBER
<i>SMART GOVERNANCE</i>	1. Indeks kepuasan masyarakat (%)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	2. Opini BPK (opini)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	3. Skor akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	4. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122:2019
	5. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	SNI ISO 37122:2019
	6. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	SNI ISO 37122:2019
	7. Persentase populasi kota dengan akses ke pita lebar (<i>broadband</i>) berkecepatan memadai	SNI ISO 37122:2019
	8. Persentase area kota di bawah zona putih / titik mati / tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi	SNI ISO 37122:2019
	9. Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas Internet yang disediakan oleh kota	SNI ISO 37122:2019
	10. Rata-rata waktu henti (<i>downtime</i>) infrastruktur teknologi informasi (TI) kota	SNI ISO 37122:2019
	11. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	SNI ISO 37122:2019
	12. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	SNI ISO 37122:2019
	13. Persentase izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik	SNI ISO 37122:2019
	14. Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari)	SNI ISO 37122:2019
	15. Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi	SNI ISO 37122:2019

2.1.2 Indikator *Smart Branding*

Tabel 5. Indikator *Smart Branding*

DIMENSI	INDIKATOR	ACUAN/SUMBER
<i>SMART BRANDING</i>	1. Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	2. Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (buah)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	3. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	SNI ISO 37122:2019
	4. Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122:2019
	5. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	SNI ISO 37122:2019

2.1.3 Indikator *Smart Economy*

Tabel 6. Indikator *Smart Economy*

DIMENSI	INDIKATOR	ACUAN/SUMBER
<i>SMART ECONOMY</i>	1. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	2. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	3. Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	4. Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	5. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	SNI ISO 37122:2019
	6. Total limbah makanan kota yang dikumpulkan tahunan dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton)	SNI ISO 37122:2019
	7. Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	SNI ISO 37122:2019
	8. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122:2019
	9. Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	SNI ISO 37122:2019
	10. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	SNI ISO 37122:2019
	11. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi	SNI ISO 37122:2019

DIMENSI	INDIKATOR	ACUAN/SUMBER
	sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri 12. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	SNI ISO 37122:2019

2.1.4 Indikator *Smart Living*

Tabel 7. Indikator *Smart Living*

DIMENSI	INDIKATOR	ACUAN/SUMBER
<i>SMART LIVING</i>	1. Angka harapan hidup (tahun)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	2. Angka kriminalitas (%)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	3. Rasio elektrifikasi (%)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	4. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	5. Persentase masyarakat yang menggunakan angkutan umum (%)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	6. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB (%)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	7. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real-time</i>) yang dapat diakses publik	SNI ISO 37122:2019
	8. Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu	SNI ISO 37122:2019
	9. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik	SNI ISO 37122:2019
	10. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersediaan parkir langsung (<i>real-time</i>)	SNI ISO 37122:2019
	11. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	SNI ISO 37122:2019
	12. Area kota dipetakan oleh peta jalan interaktif langsung (<i>real-time</i>) sebagai persentase dari total luas kota	SNI ISO 37122:2019
	13. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan otonom (<i>autonomous</i>)	SNI ISO 37122:2019
	14. Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter	SNI ISO 37122:2019
	15. Persentase jalan yang sesuai dengan sistem mengemudi otonom	SNI ISO 37122:2019

DIMENSI	INDIKATOR	ACUAN/SUMBER
	16. Persentase armada bus kota yang digerakkan dengan motor	

2.1.5 Indikator *Smart Society*

Tabel 8. Indikator *Smart Society*

DIMENSI	INDIKATOR	ACUAN/SUMBER
<i>SMART SOCIETY</i>	1. Angka harapan lama sekolah (tahun)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	2. Rata-rata lama sekolah (tahun)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	3. Jumlah pemuda yang berprestasi (orang)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	4. Jumlah atlet berprestasi (orang)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	5. Indeks pembangunan gender (%)	SNI ISO 37122:2019
	6. Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus	SNI ISO 37122:2019
	7. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	SNI ISO 37122:2019
	8. Persentase penyeberangan pejalan kaki yang ditandai dilengkapi dengan sinyal pejalan kaki yang dapat diakses	SNI ISO 37122:2019
	9. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	SNI ISO 37122:2019
	10. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	SNI ISO 37122:2019
	11. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	SNI ISO 37122:2019
	12. Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122:2019
	13. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122:2019
	14. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	SNI ISO 37122:2019
	15. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	SNI ISO 37122:2019

2.1.6 Indikator Smart Environment

Tabel 9. Indikator *Smart Environment*

DIMENSI	INDIKATOR	ACUAN/SUMBER
<p><i>SMART ENVIRONMENT</i></p>	1. Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (buah)	RPJMD Kab Buton 2017-2022
	2. Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali	SNI ISO 37122:2019
	3. Persentase biosolids yang digunakan kembali (massa bahan kering)	SNI ISO 37122:2019
	4. Energi yang berasal dari air limbah sebagai persentase dari total konsumsi energi kota	SNI ISO 37122:2019
	5. Persentase jumlah total air limbah di perkotaan yang digunakan untuk menghasilkan energi	SNI ISO 37122:2019
	6. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking real-time	SNI ISO 37122:2019
	7. Persentase air minum yang dilacak oleh stasiun pemantauan kualitas air langsung (<i>real-time</i>)	SNI ISO 37122:2019
	8. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (<i>real-time</i>) per 100.000 populasi	SNI ISO 37122:2019
	9. Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem	SNI ISO 37122:2019
	10. Persentase bangunan di perkotaan dengan meteran air cerdas	SNI ISO 37122:2019
	11. Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan telemetering	SNI ISO 37122:2019
	12. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	SNI ISO 37122:2019
	13. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	SNI ISO 37122:2019
	14. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	SNI ISO 37122:2019
	15. Persentase tempat sampah umum yang merupakan tempat sampah umum yang difungsikan dengan sensor	SNI ISO 37122:2019
	16. Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang	SNI ISO 37122:2019

DIMENSI	INDIKATOR	ACUAN/SUMBER
	17. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	SNI ISO 37122:2019
	18. Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (<i>real-time</i>) per kilometer persegi (km ²)	SNI ISO 37122:2019
	19. Persentase bangunan umum yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan	SNI ISO 37122:2019
	20. Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun Tertentu	SNI ISO 37122:2019
	21. Energi listrik dan termal (GJ) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah per kapita per tahun	SNI ISO 37122:2019
	22. Energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun	SNI ISO 37122:2019
	23. Persentase listrik kota yang diproduksi menggunakan sistem produksi listrik desentralisasi	SNI ISO 37122:2019
	24. Kapasitas penyimpanan jaringan energi kota per total konsumsi energi kota	SNI ISO 37122:2019
	25. Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	SNI ISO 37122:2019
	26. Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang	SNI ISO 37122:2019
	27. Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan	SNI ISO 37122:2019
	28. Persentase bangunan di kota dengan pengukur energi cerdas	SNI ISO 37122:2019
	29. Jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik per kendaraan listrik terdaftar	SNI ISO 37122:2019

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan *Smart City* merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Konsep *Smart City* sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan *Smart City* saat ini didukung perkembangan teknologi informasi di dunia sangatlah masif dengan berbagai inovasi yang mencuat dari kalangan generasi. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, penetrasi perangkat digital di Indonesia berkembang pesat sebagaimana tercatat bahwa 88,1 juta penduduk Indonesia telah mengakses Internet atau mencapai 34%. Dari pengguna Internet tersebut, 64,1 juta penduduk mengakses melalui mobile phone. Jumlah tersebut akan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kemantapan infrastruktur jaringan Internet di seluruh wilayah didukung antusiasme industri telekomunikasi dan digital untuk melakukan pengembangan usahanya. Perkembangan jaringan Internet ini memberikan kanal-kanal interaksi yang beragam dimana masyarakat Indonesia menjadi salah satu penerima manfaat atau pengguna terbesar di dunia.

Strategi pembangunan *Smart City* Kabupaten Buton tahun 2022-2031 dilakukan pada 6 (enam) dimensi *Smart City*, meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*). Dalam hal ini, strategi yang dirumuskan merupakan hasil telaah dari analisa SWOT-TOWS, analisis kesenjangan dan juga penetapan sasaran pembangunan *Smart City*

Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam Buku Analisis Startegis *Smart City* Daerah Kabupaten Buton.

3.1 Strategi *Smart Governance*

Dalam penerapan konsep *Smart City*, unsur pertama yang dikembangkan adalah Smart Government. Konsep Smart Government menyangkut salah satu unsur penting perkotaan, yaitu instansi pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien. Konsep Smart Government ini memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep *Smart City*, yaitu (1) Mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, (2) Mengembangkan operasional agar lebih efisien, (3) Meningkatkan manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur, (4) Membuat sistem database yang dapat diakses secara umum (5) Mengolah informasi data yang up-to-date (*real time*), (6) Menggunakan metode yang mutakhir, (7) Adanya koordinasi antar stakeholders.

Smart Governance adalah konsep atau langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan untuk kinerja yang lebih baik. Kehadiran tata kelola pemerintahan yang smart dibuktikan dengan berbagai apresiasi yang memiliki titik untkit (*leverage point*) penting dalam membentuk *Good & Clean Governance*.

Tabel 10. Strategi *Smart Governance*

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
SMART GOVERNANCE	LAYANAN PUBLIK	1. Peningkatan kualitas layanan dokumen kependudukan yang mudah diakses masyarakat	G1. Pengembangan sistem pengelolaan dokumen pelayanan publik berbasis layanan <i>on-line</i> mempermudah akses masyarakat.
	BIROKRASI	1. Terwujudnya koorDinasi kerja dan juga pendistribusian kewenangan antara OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	G2. Peningkatan koordinasi kerja dan perancangan kebijakan distribusi kewenangan antara OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
	PERANCANGAN KEBIJAKAN	1. Peningkatan tata kelola pelayanan publik melalui penetapan berbagai peraturan perundangan mengenai protap pelayanan	G3. Penyusunan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk penguatan tata kelola pelayanan publik.

3.2 Strategi *Smart Branding*

Dimensi kedua dalam pengembangan *Smart City* adalah *Smart Branding*. Sebagai upaya untuk mewujudkan daya saing daerah *Smart Branding* merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal, perilaku kecenderungan global, serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah. Konsep *Smart Branding* memiliki kemiripan dengan konsep *Smart Branding* di dalam korporasi yaitu bertujuan untuk untuk menanamkan citra di masyarakat bahkan konsumennya, jika perusahaan tersebut memiliki produk yang mereka jual, sehingga dengan adanya branding (merk dagang atau corporate identity) diharapkan brand atau merk mereka akan senantiasa diingat oleh masyarakat atau konsumennya dalam jangka waktu yang lama.

Branding daerah adalah suatu strategi untuk mendorong aktivitas perekonomian dengan menarik minat investor maupun kunjungan wisatawan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara luas, branding daerah menitikberatkan dalam *geographic branding* atau regional bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang serta *cultural branding* mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari lokasi tertentu atau kebangsaan.

Tabel 11. Strategi *Smart Branding*

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
<i>SMART BRANDING</i>	PARIWISATA	1. Mewujudkan Kabupaten Buton sebagai destinasi wisata yang unggul	B1. Pemetaan, peningkatan dan pemasaran potensi pariwisata yang didukung dengan promosi khususnya yang didukung teknologi informasi.

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
	DAYA SAING BISNIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien 2. Meningkatkan partisipasi dan inovasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif 	B2. Peningkatan kegiatan pemasaran berbasis teknologi informasi yang melibatkan partisipasi dan inovasi masyarakat khususnya untuk industri kreatif.
	WAJAH (TAMPILAN) KOTA	1. Terwujud dan dilaksanakannya secara konsisten Perda tentang RTRW Kabupaten Buton	B3. Penguatan tata kelola penerapan dan konsistensi Perda tentang RTRW Kabupaten Buton

3.3 Strategi *Smart Economy*

Di dimensi perekonomian, *Smart Economy* mendukung inovasi dan persaingan daerah. Semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan maka akan semakin menambah peluang usaha baru dan daya saing. *Smart Economy* merupakan salah satu dimensi dalam konsep *Smart City* yang didalamnya berisi seluruh aspek dalam perekonomian makro kota. *Smart Economy* adalah suatu konsep dimana individu dalam suatu kota/daerah bisa hidup secara bebas dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri untuk berkontribusi terhadap perekonomian kota.

Pencapaian dari *Smart Economy* berasal dari ketenagakerjaan dan angka kemiskinan dalam suatu kota dan dalam lingkup yang lebih luas, kemiskinan dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan menuju *Smart Economy* juga sudah disusun berdasarkan RPJMN 2019-2024. Seperti mengembangkan pencitraan kota berbasis produk unggulan, SDM unggulan, dan karakter sosial budaya lokal. Tertera juga meningkatkan kapasitas dan kemampuan inovasi SDM dalam inovasi dan kewirausahaan. Mengembangkan peran layanan sistem informasi dari semua industri, juga akan mendorong terciptanya *Smart Economy*, dalam hal ini adalah *e-business*. Selanjutnya, berjalannya proses elektronifikasi dimana pembayaran semua menggunakan transaksi non tunai.

Tabel 12. Strategi *Smart Economy*

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
SMART ECONOMY	EKOSISTEM INDUSTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing usaha dan persaingan usaha 2. Peningkatan kualitas produksi pangan lokal 3. Meningkatkan peran UMKM dalam pengelolaan produk lokal 	Ec1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk lokal yang treintegrasi dengan penguatan peran UMKM.
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kapasitas usaha lokal 2. Pengelolaan pangan lokal untuk membuka kesempatan kerja 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum 	Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kemudahan akses kredit usaha bagi para pelaku UMKM 2. Penguatan kelompok usaha masyarakat dan juga koperasi dalam mendukung perekonomian daerah 	Ec3. Pembangunan ekosistem investasi usaha yang memberikan kemudahan akses pembiayaan khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah.

3.4 Strategi *Smart Living*

Pengembangan selanjutnya adalah dimensi *Smart Living*. *Smart Living* adalah pengembangan kelayakan taraf hidup masyarakat dengan mengintegrasikan segmen dalam suatu kota yang saling mempengaruhi untuk membentuk *livable city* (jika kota benar-benar dimaknai sebagai tempat hidup) seperti fisik kota, kualitas lingkungan, transportasi-aksesibilitas, fasilitas pelayanan publik, utilitas, kapasitas prekonomian, sosial, keamanan maupun birokrasi pemerintahan. Setiap kriteria dalam suatu kota yang layak untuk bertempat tinggal membutuhkan perencanaan yang komprehensif untuk membentuk kota sebagai tempat tinggal seperti halnya fundamental bursa saham yang kuat untuk menjaga keseimbangan transaksi dan meningkatnya kapitalisasi.

Fundamental livable city sangatlah bersinggungan erat dengan lingkungan baik biotik maupun abiotik. Keseimbangan lingkungan dalam sistem ekologi adalah *quality assurance* terhadap keberlanjutan kehidupan suatu kota maka suatu keharusan bagi kota-kota metropolitan yang terus tumbuh untuk menjaga kedaulatan ekologi ditengah kolonisasi manusia dan bangunan gedungnya. Kedaulatan ekologi perkotaan adalah kunci dari keberlanjutan kehidupan perkotaan. Keseimbangan ekologi, keberlanjutan ekologi, keutuhan ekologi, ketidakrusakan ekologi, atau yang lebih mantap disebut Kedaulatan Ekologi merupakan suatu guidance untuk mengubah wajah kota yang jauh dari berseri menuju kota yang ekologis. Sebagaimana makna kota ekologis sebagai pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini merupakan rasionalisasi atas kepentingan kota metropolitan yang cenderung didominasi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Aksesibilitas lokal maupun internasional merupakan faktor-faktor dari mobilitas selain dari ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan mempengaruhi pola hidup yang pintar yang berkaitan dengan aspek kualitas hidup masyarakat kota juga merupakan dua elemen yang tidak kalah penting. Di sisi mobilitas penduduk, belum adanya transportasi massal terutama sistem transportasi angkutan orang belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan dan menjadi penghubung dengan daerah lain, parkir yang tidak tertata menyebabkan hilangnya potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 13. Strategi *Smart Living*

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
SMART LIVING	HARMONISASI TATA RUANG	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan baru bagi rumah tidak layak huni2. Meningkatkan kualitas kawasan perumahan yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas yang memadai	L1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan yang layak dan didukung sarpras serta utilitas yang memadai.
	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kualitas layanan Kesehatan2. Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan	L2. Pengembangan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi untuk peningkatan kualitas layanan

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya jenis dan jumlah tenaga Kesehatan 4. Meningkatnya efektifitas hunian tempat tidur RS 	kesehatan, kapasitas SDM kesehatan, dan juga layanan fasilitas kesehatan.
	TRANSPORTASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya layanan sektor perhubungan atau transportasi 2. Tersedianya prasarana atau fasilitas perhubungan guna terwujudnya konektivitas antar wilayah 	L3. Pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan mendukung mobilitas masyarakat antar wilayah secara efisien.

3.5 Strategi *Smart Society*

Pengembangan dimensi selanjutnya adalah *Smart Society*. Dimensi *Smart Society* membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Kunci keberhasilan *Smart City* adalah penerapan seluruh komponen secara holistik. Namun demikian, komponen yang paling penting untuk mengakselerasi penerapan *Smart City* tidak hanya terletak pada smart infrastruktur, melainkan juga pada warga dan pemerintah kota. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa infrastruktur, warga, dan pemerintah kota merupakan *enabler* yang perlu ditonjolkan.

Tidak sedikit kota yang terjebak hanya mengembangkan teknologi/aplikasi namun mengabaikan *enabler*. Contohnya sebuah kota yang sudah memiliki *Command Center*, tapi tetap saja, kemacetan masih terjadi. Kurangnya edukasi terhadap warga untuk mengubah perilaku keseharian, menjadikan kesiapan penggunaan teknologi menjadi kurang maksimal.

Tabel 14. Strategi *Smart Society*

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
SMART SOCIETY	INTERAKSI MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan komunitas seperti peduli lingkungan 2. Mengarahkan dana CSR pertambangan kepada program-program edukasi 	S1. Peningkatan peran masyarakat dalam mendukung usaha untuk merealisasikan ekosistem komunikasi yang smart.

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
		komunitas (perpustakaan, forum-forum edukasi) serta beasiswa 3. Penguatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan mengembangkan lembaga-lembaga adat, seni dan budaya 4. Klastering area pemukiman dan pertambangan/industri	
	EKOSISTEM BELAJAR/PENDIDIKAN	1. Pembuatan pendidikan vokasi (SMK & Politeknik) di bidang yang berpotensi membangun daerah (pariwisata, kesehatan, keguruan dan teknologi informasi) 2. Peningkatan jumlah penerima beasiswa (dari pemerintah daerah, Bidik Misi, Kerja sama dengan industri, dsb)	S2. Penguatan insfrastruktur pendidikan vokasi yang fokus pada bidang pariwisata, kesehatan, keguruan dan teknologi informasi serta didukung dengan pemberian beasiswa.
	KEAMANAN MASYARAKAT	1. Pengembangan sistem keamanan terpadu yang didukung TIK secara bertahap (kamera pengamat pada lokasi rawan, sistem pengaduan, sistem peringatan dini keamanan) 2. Penambahan jumlah tenaga penyuluh perlindungan perempuan dan anak 3. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan untuk menciptakan stabilitas keamanan kondusif	S3. Pengembangan sistem layanan kegawatdaruratan dan keselamatan masyarakat berbasis teknologi informasi yang didukung dengan penguatan tenaga layanan keselamatan.

3.6 Strategi *Smart Environment*

Pengembangan dimensi terakhir adalah *Smart Environment*. Filosofi pembangunan berkelanjutan termasuk pembangunan kota adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sebagai strategi pengelolaan lingkungan hidup yang cerdas, konsep *Smart Environment* mengedepankan lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, ruang terbuka hijau yang stabil.

Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup menjadi agenda yang cukup dominan sebagai bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dari 17 *goals* dan 169 target dimana terdapat banyak goal yang terkait dengan lingkungan yaitu; (a) *Ensure availability and sustainable use of water and sanitation for all*. Memastikan ketersediaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan atas air bersih dan sanitasi untuk semua, (b) *Ensure sustainable energy for all*. Memastikan energi yang berkelanjutan untuk semua; (c) *Make cities and human settlements inclusive, safe and sustainable*. Menciptakan kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman dan berkelanjutan. (d) *Tackle climate change and its impacts*. Menanggulangi perubahan iklim dan dampaknya, dan (e) *Conserve and promote sustainable use of oceans, seas and marine resources*. Memulihkan dan memajukan pemanfaatan yang berkelanjutan akan sumber daya laut, dan (f) *Protect and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, halt desertification, land degradation and biodiversity loss*. Melindungi dan memajukan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem bumi, menghentikan penggundulan hutan, pengrusakan tanah dan kerusakan keanekaragaman hayati.

Memperhatikan sasaran prioritas di tiap dimensi/sub-dimensi Buton *Smart City* meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart*

environment) maka strategi yang ditetapkan guna mencapai berbagai sasaran tersebut dijabarkan dalam Tabel 15.

Tabel 15. Strategi *Smart Environment*

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	STRATEGI
SMART ENVIRONMENT	PROTEKSI LINGKUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan/usaha wajib, AMDAL, UKL, UPL dan SPPL Meningkatnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga lingkungan hidup 	En1. Penguatan pengawasan terhadap berbagai kegiatan usaha yang memiliki potensi/dampak pencemaran lingkungan.
	PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dan limbah domestik 	En2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah berbasis <i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace</i>
	TATA KELOLA ENERGI	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan energi alternatif (<i>green energy</i>) yang ramah lingkungan seperti pemanfaatan limbah/sampah menjadi biogas 	En3. Pengembangan rencana produksi energi alternatif berbasis pengembangan sumber daya energi melalui komoditas sampah organik (<i>waste to energy</i>)

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Pengembangan strategi Buton *Smart City* di 6 (enam) dimensi meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*) merupakan telaah dari analisa SWOT sebagaimana dijabarkan dalam Buku Analisis Strategis *Smart City* Daerah, yaitu pada Bab Analisis Kesenjangan dan SWOT-TOWS. Menurut Pearce dan Robinson (2011:140), penjelasan dari *Strength-Weakness-Opportunities-Threats* (SWOT) adalah “*acronym for the internal Strengths and Weaknesses of a firm, and the environmental Opportunities and Threats facing*

that firm. SWOT analysis is a technique through which managers create a quick overview of a company's strategic situation". Menurut David (2011:178) mendefinisikan "SWOT is an important matching tool that helps manager develop four types of strategies: SO (Strength-Opportunities) Strategies, WO (Weaknesses-Opportunities) Strategies, ST (Strength-Threats) and WT (Weakness-Threats) Strategies".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT merupakan alat pencocokan yang dapat membantu pengelola atau pengambil keputusan untuk mengembangkan strategi dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

BAB IV

RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH

Rencana Aksi (*Action Plan*) pelaksanaan Buton *Smart City* merupakan penjabaran strategi yang dirumuskan dalam bentuk program kerja (*output* atau sub *output* suatu kegiatan kunci). Rencana aksi dibedakan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu tahaan kesiapan dan program kerja prioritas. Rencana Aksi pada tahapan kesiapan implementasi *Smart City* dibedakan menjadi:

- Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *Smart City*;
- Rencana pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City*;
- Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *Smart City*;
- Rencana penguatan literasi *Smart City*;

Tahapan kedua adalah program kerja prioritas. Program kerja Pembangunan *Smart City* di Kabupaten Buton disusun oleh segenap OPD di Kabupaten Buton. Program kerja prioritas merupakan program-program kerja (*output* atau sub *output* suatu kegiatan kunci) yang dirumuskan untuk mewujudkan strategi, sasaran, dan visi Buton *Smart City* secara optimal serta dinilai memiliki titik ungkit tertinggi yang dibagi ke dalam (enam) dimensi Buton *Smart City* meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).

Program Pembangunan *Smart City* mencakup program dan kegiatan yang sudah berjalan (sebagaimana termaktub dalam RPJMD dan Renstra OPD); dan juga inisiatif baru yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, baik jangka pendek (1 tahun ke depan), jangka menengah (5 tahun ke depan), maupun jangka panjang (10 tahun ke depan). Namun demikian, khususnya untuk Program Jangka Menengah dan Program Jangka Panjang, dimungkinkan dilakukan revisi pada tahun-tahun berjalan di masa depan, mengingat perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di masa depan. Oleh sebab itu, dokumen Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton bukanlah merupakan dokumen yang bersifat statis, namun bersifat dinamis, dalam arti setiap tahun dapat dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana sifat dari manajemen strategis.

Penilaian terhadap ketercapaian indikator program kerja dilaksanakan melalui pendekatan analisa Carel meliputi kapabilitas sumber daya dalam melaksanakan pencapaian kinerja, kemudahan, kesiapan, keluasan dampak, dan efek yang ditimbulkan. Rumusan penilaian Carel dijabarkan sebagaimana berikut:

- *Capabilities*: Kemampuan untuk bisa melaksanakan strategi;
- *Accessibilities*: Kemudahan melaksanakan;
- *Readiness*: Kesiapan semua pihak untuk melaksanakan dan menerima konsekuensi kalau strategi dilaksanakan;
- *Extend*: Keluasan dari cakupan strategi tersebut atau dampak (manfaat) yang akan ditimbulkan;
- *Leverage*: Efek domino atau dampak ganda.

Penilaian Carel menghasilkan timeline pencapaian program kerja pada tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penilaian terhadap akuntabilitas indikator kinerja dilaksanakan melalui kriteria *SMART-C* yang dijelaskan sebagai parsyarat dalam pembentukan indikator kinerja. Rumusan kriteria meliputi:

1. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
2. *Well Defined*, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
3. *Measurable*, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas/ harga.
4. *Appropriate*, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
5. *Reliable*, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
6. *Verifiable*, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
7. *Cost-effective*, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Rencana Aksi (*Action Plan*) pembangunan Buton *Smart City* dirumuskan sebagaimana berikut:

4.1 Rencana Aksi *Smart Governance*

Rencana aksi Pembangunan *Smart City* pada dimensi *Smart Governance* di Kabupaten Buton yang terdiri dari Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak dan juga Penguatan Literasi disampaikan pada tabel di bawah ini.

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Peningkatan Pelayanan Publik	G1. Pengembangan sistem pengelolaan dokumen pelayanan publik berbasis layanan <i>on-line</i> mempermudah akses masyarakat.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan peraturan pendukung implementasi sistem	2022	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur	2022	Implementasi <i>e-office</i> untuk pengelolaan surat menyurat internal maupun eksternal	2022	Sosialisasi dan pelathina bagi ASN dan masyarakat dalam hal pemanfaatan teknologi	2022
							Pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pengajuan izin penelitian dan juga perpanjangan SKT bagi Ormas	2023		
							Penerapan tanda tangan digital untuk keperluan surat menyurat dan penerbitan izin	2024		
Peningkatan Pelayanan Publik	G1. Pengembangan sistem pengelolaan dokumen pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kerja sama dan pengembangan sistem penerbitan akte lahir, akte kematian, penyesuaian KK dan KTP (setelah pernikahan)	2023	Penyediaan mobil layanan keliling yang dilengkapi dengan koneksi Internet dan juga perangkat komputer untuk	2025	Pengembangan aplikasi mobile untuk pelayanan pendaftaran penduduk (510	2022	Sosialisasi dan pelathina bagi ASN dan masyarakat dalam hal pemanfaatan teknologi	2022

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	berbasis layanan <i>on-line</i> mempermudah akses masyarakat.		Peningkatan pemanfaatan data NIK sebagai identitas tunggal untuk pemberian layanan publik di seluruh OPD	2024	mendukung layanan adminduk		KTP-el, 2.667 KK, 2.611 KIA)			
Peningkatan Pelayanan Publik	G1. Pengembangan sistem pengelolaan dokumen pelayanan publik berbasis layanan <i>on-line</i> mempermudah akses masyarakat.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota : Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengembangan Sistem SOP Pelayanan Perluasan penerapan sistem hingga ke tingkat Desa	2022 2026	Penguatan infrastruktur pendukung aplikasi kearsipan	2023	Implementasi <i>e-office</i> untuk administrasi umum dan kearsipan Pemanfaatan tanda tangan digital untuk surat menyurat Pengembangan sistem permintaan surat dari masyarakat secara <i>on-line</i>	2023 2024 2025	Pelatihan dan sosialisasi penggunaan tanda tangan digital	2024
Birokrasi Pemerintahan	G2. Peningkatan koordinasi kerja dan perancangan kebijakan distribusi kewenangan antara OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Inventarisasi barang milik daerah	Penyusunan peraturan pendukung penghitungan depresiasi aset	2025	Penyediaan infrastruktur server pendukung aplikasi	2025	Implementasi sistem penghitungan depresiasi nilai aset Pengembangan implementasi sistem informasi pengelolaan aset daerah yang berbasis lokasi	2025 2026	Pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem penghitungan depresiasi nilai aset	2025
Birokrasi Pemerintahan	G2. Peningkatan koordinasi kerja dan perancangan kebijakan	Pengamanan Barang Milik Daerah	Penyusunan peraturan penggunaan qr-code	2026	Penyediaan infrastruktur server pendukung aplikasi	2026	Penggunaan sistem <i>qr-code</i> untuk pelacakan	2026	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan sistem	2026

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	distribusi kewenangan antara OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan									
Birokrasi Pemerintahan	G2. Peningkatan koordinasi kerja dan perancangan kebijakan distribusi kewenangan antara OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan peraturan penggunaan SiDDiK	2022	Penyediaan infrastruktur pemeliharaan aplikasi SiDDiK	2022-2026	Pengembangan aplikasi SiDDiK berbasis mobile untuk mempermudah pengajuan kenaikan pangkat, mutasi ataupun pensiun	2022	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan aplikasi SiDDiK	2023
Birokrasi Pemerintahan	G2. Peningkatan koordinasi kerja dan perancangan kebijakan distribusi kewenangan antara OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pengembangan Kompetensi ASN	Perencanaan pengembangan kompetensi SDM dan pencatatannya dilakukan menggunakan sistem informasi: SiDDiK, LAKIM	2022	Pemeliharaan infrastruktur server sistem informasi: SiDDiK, LAKIM	2022	Pemeliharaan sistem informasi: SiDDiK, LAKIM	2022	Sosialisasi penggunaan sistem informasi: SiDDiK, LAKIM	2022
Birokrasi Pemerintahan	G2. Peningkatan koordinasi kerja dan perancangan kebijakan distribusi kewenangan antara OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan peraturan penilaian kinerja ASN	2022	Pemeliharaan infrastruktur server sistem informasi: LAKIM dan SIPINTER	2022	Penggunaan aplikasi LAKIM untuk penilaian kinerja ASN, tahun 2019 - 2031 Penggunaan aplikasi SIPINTER	2022 2022	Sosialisasi penggunaan sistem informasi: SIPINTER	2022

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Birokrasi Pemerintahan	G2. Peningkatan koordinasi kerja dan perancangan kebijakan distribusi kewenangan antara OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan G3. Penyusunan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk penguatan tata kelola pelayanan publik.	1. Penyusunan Data Terpadu Daerah 2. Penyusunan Profile Daerah 3. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 4. Pengumpulan dan Updating Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya 5. Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi dan Pengendalian Dana Alokasi Khusus 6. Pelaporan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 7. Pengumpulan dan Updating Data Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah 8. Ekspose Capaian Hasil-Hasil Pembangunan 9. Pengadaan Website 10. Pengelolaan Website	Optimalisasi SIPD, SAKIP, SIMDA, Sistem Informasi Penanganan Stunting	2022	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur website	2023	Integrasi data ekspos capaian hasil-hasil pembangunan ke website Bappeda ataupun media lainnya Pembangunan peta digital potensi wilayah berbasis GIS	2023 2025	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi yang ada pada website	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		11. Perpres Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi HAM Tahun 2015-2019 12. Pengadaan Aplikasi Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 13. Pengelolaan Aplikasi Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 14. Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan								

4.2 Rencana Aksi *Smart Branding*

Rencana aksi Pembangunan *Smart City* pada dimensi *Smart Branding* di Kabupaten Buton yang terdiri dari Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak dan juga Penguatan Literasi disampaikan pada tabel di bawah ini.

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Peningkatan Pariwisata	B1. Pemetaan, peningkatan dan pemasaran potensi pariwisata yang didukung dengan promosi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Penyusunan peraturan bidang pariwisata	2024	Penyediaan infrastruktur SIMPARTA	2024	SIMPARTA untuk dapat memfasilitasi pemesanan kamar di <i>guest house/home stay</i> secara <i>online</i>	2024	Pelatihan dan sosialisasi bagi ASN dan pelaku pariwisata	2024

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	khususnya yang didukung teknologi informasi.	Pariwisata Kabupaten/Kota								
Peningkatan Pariwisata	B1. Pemetaan, peningkatan dan pemasaran potensi pariwisata yang didukung dengan promosi khususnya yang didukung teknologi informasi.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyusunan RIPARTA	2023	Peningkatan fasilitas infrastruktur TIK di spot wisata Wabula, <i>Dive Center</i> Pasarwajo di tahun 2023 untuk mendukung aktivitas wisatawan	2023	SIMPARTA untuk pemesanan wisata selam	2024	Pelatihan dan sosialisasi bagi ASN dan pelaku pariwisata	2024
Peningkatan dan Penataan Wajah Kota	B3. Penguatan tata kelola penerapan dan konsistensi Perda tentang RTRW Kabupaten Buton	Program Pengembangan Perumahan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Menempatkan Dokumen Publik Ke Portal Perkim	2022	Penyediaan infrastruktur portal Perkim	2023	Pembuatan Portal Perkim	2023 - 2026	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan portal Perkim	2023
Peningkatan dan Penataan Wajah Kota	B3. Penguatan tata kelola penerapan dan konsistensi Perda tentang RTRW Kabupaten Buton	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Ijin Online Pemakaman Melalui Portal (SOP Pemakaman) utk 7 Kec	2023-2026	Penyediaan infrastruktur portal Ijin <i>Online</i> Pembangunan Infrastruktur Desa	2022	Ijin Online Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Portal	2022	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan portal Ijin <i>Online</i> Pembangunan Infrastruktur Desa	2023

4.3 Rencana Aksi *Smart Economy*

Rencana aksi Pembangunan *Smart City* pada dimensi *Smart Economy* di Kabupaten Buton yang terdiri dari Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak dan juga Penguatan Literasi disampaikan pada tabel di bawah ini.

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pengembangan Ekosistem Industri	Ec1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk lokal yang treintegrasi dengan penguatan peran UMKM.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyusunan SOP penggunaan SiDAJUL	2023	Penyediaan infrastruktur pendukung SiDAJUL	2024	SiDAJUL Aktif Kembali	2024	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan SiDAJUL	2024
Pengembangan Ekosistem Industri	Ec1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk lokal yang treintegrasi dengan penguatan peran UMKM.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Penyusunan SOP pelaksanaan tera ulang berbasis aplikasi	2024	Penyediaan infrastruktur server Aplikasi Pencatatan Tera Ulang	2024	Aplikasi Pencatatan Tera Ulang	2024	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan Aplikasi Pencatatan Tera Ulang	2024
Pengembangan Ekosistem Industri	Ec1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk lokal yang treintegrasi dengan penguatan peran UMKM.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyusunan peraturan untuk pengelolaan KIM	2023	Penyediaan infrastruktur aplikasi pendaftaran IKM	2023	Pengembangan Aplikasi - untuk pendaftaran IKM	2023	Optimalisasi Blog Dinas (Penambahan Fitur Permintaan Info ttg pembukuan IKM, dll) - SIINas	2022
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya lapangan kerja	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota Dalam	Membuat Kegiatan Sentralisasi Data Otomasi Aplikasi untuk mengotomasikan Proses Informasi Harga Pangan	2023 2024	Penyediaan infrastruktur untuk mendukung aplikasi Penyampaian Informasi Perihal Kegiatan Dinas KP	2022	Pengembangan Aplikasi yang bersifat "Penyampaian Informasi Perihal Kegiatan Dinas KP"	2022	Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Penyampaian Informasi Perihal Kegiatan Dinas KP	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	(Kelanjutan Sentralisasi Data)							
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	Penyusunan SOP penanganan kerawanan pangan	2024	Penyediaan infrastruktur pendukung Aplikasi untuk Pemantauan Kerawanan Pangan	2024	Aplikasi untuk Pemantauan Kerawanan Pangan	2024	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan Aplikasi untuk Pemantauan Kerawanan Pangan	2024
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		Penyusunan SOP pemberian layanan dan informasi tentang Koperasi dan UMKM	2022	Penyediaan infrastruktur Sistem Layanan dan Informasi Tentang Koperasi dan UMKM	2022	Membuat Sistem Layanan dan Informasi Tentang Koperasi dan UMKM	2022	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan Sistem Layanan dan Informasi Tentang Koperasi dan UMKM	2022
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam	Penyusunan SOP penyediaan informasi dan monev Koperasi	2023	Penyediaan infrastruktur aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil output dari Sistem Penilaian	2023	Membuat Informasi MoNev Koperasi - Melalui Media Sosial atau Web Dinas Membuat aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil output dari Sistem Penilaian	2023 2024	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan Sistem Informasi MoNev Koperasi	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Pembentukan Koperasi Baru	Menyiapkan Sistem Layanan Perijinan Koperasi Oleh Pengusul. Layanan Sistem Perijinan UMKM berbasis Web. (PJ Entry Data di Kecamatan)	2023	Penyediaan infrastruktur pendukung aplikasi pengajuan pembukaan Koperasi baru	2023	Pembangunan aplikasi pengajuan pembukaan Koperasi baru	2023	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan aplikasi pengajuan pembukaan Koperasi baru	2023
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Daerah Kabupaten/Kota	Kebutuhan Peralatan Modern (Smart Alat Tani) Pengadaan alat pemantau tanaman berbasis Drone (Jangka Menengah sampai tahap FS)	2023 2023	Penyediaan infrastruktur untuk SI Potensi Lokasi untuk Ketahanan pangan dan SI Penyuluhan Pertanian	2022	SI Potensi Lokasi untuk Ketahanan pangan SI Penyuluhan Pertanian	2022 2022	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan SI Potensi Lokasi untuk Ketahanan pangan dan SI Penyuluhan Pertanian	2022
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyusunan SOP pelaksanaan penyuluhan pertanian secara online	2026	Penyediaan infrastruktur pendukung aplikasi penyuluhan online	2026	Pengembangan aplikasi penyuluhan online	2026	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2022-2026
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1	Penyusunan SOP Sistem Informasi Toko Penjual Bahan	2026	Penyediaan infrastruktur Sistem Informasi Toko Penjual Bahan	2026	Informasi Toko Penjual Bahan (pengembangan yg sdh ada).	2026	Sosialisasi dan pelatihan penggunaan Sistem Informasi Toko Penjual Bahan	2026

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain								
Pengembangan Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec3. Pembangunan ekosistem investasi usaha yang memberikan kemudahan akses pembiayaan khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah/Kabupaten /Kota	Penyusunan SOP Pencatatan Pengawasan - hasil <i>output</i> dari Sistem Penilaian berbasis aplikasi	2024	Penyediaan infrastruktur aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil output dari Sistem Penilaian	2024	Membuat aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil output dari Sistem Penilaian	2024	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil <i>output</i> dari Sistem Penilaian	2024

4.4 Rencana Aksi *Smart Living*

Rencana aksi Pembangunan *Smart City* pada dimensi *Smart Living* di Kabupaten Buton yang terdiri dari Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak dan juga Penguatan Literasi disampaikan pada tabel di bawah ini.

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	L1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan yang layak dan didukung sarpras	Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Penyusunan SOP pengelolaan SI Pelabuhan Sungai dan Danau	2023	Penyediaan infrastruktur SI SI Pelabuhan Sungai dan Danau	2023	Adanya SI Pelabuhan Sungai dan Danau - memiliki fitur pemesanan tiket, dll	2023	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan SI Pelabuhan Sungai dan Danau	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	serta utilitas yang memadai.									
Mewujudkan Sarana - Prasarana Kesehatan	L2. Pengembangan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, kapasitas SDM kesehatan, dan juga layanan fasilitas kesehatan.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Penyusunan SOP integrasi data	2023	Penyediaan infrastruktur pendukung integrasi sistem informasi	2023	Integrasi dengan SI - Layanan RS	2023	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan modul integrasi	2023
Ketersediaan Sarana - Prasarana Transportasi	L3. Pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan mendukung mobilitas masyarakat antar wilayah secara efisien.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP Pengelolaan Aset	2023	Penyediaan infrastruktur untuk Aplikasi Pencatatan Aset Perhubungan dan Sistem Basis Data pencatatan Aset - Program Buton Terang	2023	Aplikasi Pencatatan Aset Perhubungan Sistem Basis Data pencatatan Aset - Program Buton Terang	2023 2023	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan Aplikasi Pencatatan Aset Perhubungan dan Sistem Basis Data pencatatan Aset - Program Buton Terang	2023
Ketersediaan Sarana - Prasarana Transportasi	L3. Pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan mendukung mobilitas masyarakat antar wilayah secara efisien.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Membuat rancangan Pembangunan Gedung Terminal	2022	Pembangunan Gedung Terminal	2022	Pengembangan aplikasi yang mendukung operasional Gedung terminal	2023	Membuat Informasi Pembangunan Gedung Terminal - Fasilitas yang ada, dll Melalui Media Sosial atau Web Dinas	2022

4.5 Rencana Aksi *Smart Society*

Rencana aksi Pembangunan *Smart City* pada dimensi *Smart Society* di Kabupaten Buton yang terdiri dari Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak dan juga Penguatan Literasi disampaikan pada tabel di bawah ini.

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Interaksi Masyarakat Yang Efisien	S1. Peningkatan peran masyarakat dalam mendukung usaha untuk merealisasikan ekosistem komunikasi yang smart.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan: Penyadaraan, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Penyusunan SOP Tata Kelola Portal Dispora	2022	Penyediaan infrastruktur pendukung untuk Portal Dispora	2022	Pengembangan Portal Dispora	2022	Konten Manajemen Portal Dispora	2022
Interaksi Masyarakat Yang Efisien	S1. Peningkatan peran masyarakat dalam mendukung usaha untuk merealisasikan ekosistem komunikasi yang smart.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan	Penyusunan SOP pelaksanaan Dialog Pemuda	2022	Penyediaan fasilitas pelaksanaan Dialog Pemuda	2022	Pengembangan aplikasi untuk menampung masukan Pemuda	2024	Pelaksanaan Dialog Pemuda	2022

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Daerah Kabupaten / Kota								
Interaksi Masyarakat yang Efisien	S1. Peningkatan peran masyarakat dalam mendukung usaha untuk merealisasikan ekosistem komunikasi yang smart.	Program Administrasi Pemerintahan Desa: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penyusunan peraturan dan SOP untuk penggunaan SRIKANDI	2022	Penyediaan infrastruktur pendukung penggunaan SRIKANDI di Desa	2022	Tata Naskah Menggunakan SRIKANDI dari Kominfo (SRIKANDI dapat digunakan)	2022	Sosialisasi penggunaan SRIKANDI bagi ASN	2022
Interaksi Masyarakat yang Efisien	S1. Peningkatan peran masyarakat dalam mendukung usaha untuk merealisasikan ekosistem komunikasi yang smart.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP pengelolaan Portal BKMD	2022	Penyediaan infrastruktur untuk hosting Portal BKMD	2022	Pengembangan Portal BKMD	2022	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan Portal BKMD	2022
Mewujudkan Ekosistem Belajar	S2. Penguatan infrastruktur pendidikan vokasi yang fokus pada bidang pariwisata, kesehatan, kejuruan dan teknologi informasi serta	Program Pembinaan Perpustakaan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Penyusunan SOP pengelolaan dan pemanfaatan Digital Library	2022	Penyediaan infrastruktur untuk hosting Digital Library	2022	Pembangunan Digital Library (SLIMS)	2022	Sosialisasi keberadaan Digital Library pada masyarakat	2022

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	didukung dengan pemberian beasiswa.									
Mewujudkan Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	S3. Pengembangan sistem layanan kegawatdaruratan dan keselamatan masyarakat berbasis teknologi informasi yang didukung dengan penguatan tenaga layanan keselamatan.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran Penyusunan Norma, standar, prosedur dan Penyusunan Norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Penyusunan SOP untuk pengelolaan Portal DAMKAR	2023	Penyediaan infrastruktur pendukung Portal DAMKAR	2023	Implementasi Portal DAMKAR	2023-2026	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan Portal DAMKAR	2023
Mewujudkan Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	S3. Pengembangan sistem layanan kegawatdaruratan dan keselamatan masyarakat berbasis teknologi informasi yang didukung dengan penguatan tenaga layanan keselamatan.	Program Rehabilitasi Sosial: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyusunan peraturan dan SOP untuk pendataan masyarakat miskin dan juga integrasi dengan Portal DINKES	2023	Penyediaan infrastruktur pendukung Aplikasi WEB Pendataan Masyarakat Miskin dan Integrasi dengan Portal DINKES	2023	Pengaduan Masyarakat offline Pukesos, aplikasi SIGADISDESA -> Sistem Integrasi Data Kemiskinan Desa /Kelurahan, Aplikasi WEB Pendataan Masyarakat Miskin Integrasi dengan Portal DINKES	2022 2023 2024	Pelatihan penggunaan dan sosialisasi Aplikasi WEB Pendataan Masyarakat Miskin dan Integrasi dengan Portal DINKES	2024

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Mewujudkan Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	S3. Pengembangan sistem layanan kegawatdaruratan dan keselamatan masyarakat berbasis teknologi informasi yang didukung dengan penguatan tenaga layanan keselamatan.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP orises integrasi dengan data DUKCAPIL	2022	Penyediaan infrastruktur untuk mendukung proses integrasi	2022	Integrasi dengan data DUKCAPIL	2022	Pelatihan penggunaan dan pemeliharaan modul integrasi data DUKCAPIL	2022

4.6 Rencana Aksi Smart Environment

Rencana aksi Pembangunan *Smart City* pada dimensi *Smart Environment* di Kabupaten Buton yang terdiri dari Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengembangan Perangkat Lunak dan juga Penguatan Literasi disampaikan pada tabel di bawah ini.

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Proteksi Lingkungan	En1. Penguatan pengawasan terhadap berbagai kegiatan usaha yang memiliki potensi/dampak pencemaran lingkungan.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persiapan SOP dan Konten Portal PP	2022	Penyediaan infrastruktur Portal PP (PORTAL POSPP)	2023	Implementasi Portal PP (PORTAL POSPP)	2023-2026	Pelatihan penggunaan, pemeliharaan dan sosialisasi Portal PP (PORTAL POSPP)	2023
Proteksi Lingkungan	En1. Penguatan pengawasan terhadap berbagai	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Penyusunan tata kelola dan manajemen Portal DLH	2022	Penyediaan infrastruktur Portal DLH	2022	Portal DLH	2022	Pelatihan dan sosialisasi penggunaan serta pemeliharaan Portal DLH	2022

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	kegiatan usaha yang memiliki potensi/dampak pencemaran lingkungan. En2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah berbasis Reduce, Reuse, Recycle, Replace	Kerusakan Lingkungan Hidup: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota								
Proteksi Lingkungan	En1. Penguatan pengawasan terhadap berbagai kegiatan usaha yang memiliki potensi/dampak pencemaran lingkungan.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Penyusunan SOP penanganan laporan masyarakat	2022	Penyediaan infrastruktur pendukung sistem pelaporan masyarakat	2022	Portal LH + Modul Pelaporan Masyarakat	2022	Sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaporan	2022
Proteksi Lingkungan	En1. Penguatan pengawasan terhadap berbagai kegiatan usaha yang memiliki potensi/dampak pencemaran lingkungan.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3): Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penyusunan SOP penanganan laporan masyarakat	2022	Penyediaan infrastruktur pendukung sistem pelaporan masyarakat	2022	Sistem Pelaporan Pencemaran Lingkungan Melalui Portal DLH	2022	Sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaporan	2022
Proteksi Lingkungan	En1. Penguatan pengawasan terhadap berbagai kegiatan usaha yang memiliki	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup : Pemberian penghargaan	Penyusunan SOP penanganan laporan masyarakat	2022	Penyediaan infrastruktur pendukung sistem pelaporan masyarakat	2022	Portal Penganganan Konten Aduan	2022	Sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaporan	2022

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	n Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2. Pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pengajuan izin penelitian dan juga perpanjangan SKT bagi Ormas 3. Penerapan tanda tangan digital untuk keperluan surat menyurat dan penerbitan izin				Website pengajuan izin kegiatan	APBD	Website pengajuan izin kegiatan	APBD	Website pengajuan izin kegiatan	APBD	Website pengajuan izin kegiatan	APBD	
						Diterapkannya tanda tangan digital	APBD	Diterapkannya tanda tangan digital	APBD	Diterapkannya tanda tangan digital	APBD	Diterapkannya tanda tangan digital	APBD	
Sub-Dimensi: Birokrasi Pemerintahan														
G2. Peningkatan koorDinasi kerja dan perancangan kebijakan distribusi kewenangan antara OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inventarisasi barang milik daerah	1. Impementasi sistem e-office untuk administrasi surat menyurat (100%) 1. Implementasi sistem penghitungan depresiasi nilai aset 2. Pengembangan implementasi sistem informasi pengelolaan aset daerah yang berbasis lokasi	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Digunakan nya aplikasi e-office Inovasi dilakukan tahun 2025	APBD/ 357,875, 000 Tidak ada	Digunakannya aplikasi e-office Inovasi dilakukan tahun 2025	APBD Tidak ada	Digunakannya aplikasi e-office Inovasi dilakukan tahun 2025	APBD Tidak ada	Digunakannya aplikasi e-office Aplikasi pengelolaan aset	APBD APBD	Digunakannya aplikasi e-office Sistem pengelolaan aset berbasis lokasi	APBD APBD	BKAD

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	1. Penggunaan sistem qr-code untuk pelacakan keberadaan aset	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inovasi dilakukan tahun 2026	Tidak ada	Inovasi dilakukan tahun 2026	Tidak ada	Inovasi dilakukan tahun 2026	Tidak ada	Inovasi dilakukan tahun 2026	Tidak ada	Terdapatnya keberadaan aset daerah	APBD	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Pengembangan aplikasi SiDDIK berbasis mobile untuk mempermudah pengajuan kenaikan pangkat, mutasi ataupun pensiun 2. Pemeliharaan aplikasi SiDDIK	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aplikasi SiDDIK digunakan 100%	APBD / 75140000	Aplikasi SiDDIK digunakan 100%	APBD	Aplikasi SiDDIK digunakan 100%	APBD	Aplikasi SiDDIK digunakan 100%	APBD	Aplikasi SiDDIK digunakan 100%	APBD	BKPSDM
	Pengembangan Kompetensi ASN	1. Integrasi sistem informasi: SiDDiK, LAKIM	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan pengembangan kompetensi SDM dan pencatatan nya dilakukan menggunakan sistem	APBD (1.291.294.050)	Terintegrasinya SiDDiK dan LAKIM	APBD	Terintegrasinya SiDDiK dan LAKIM	APBD	Terintegrasinya SiDDiK dan LAKIM	APBD	Terintegrasinya SiDDiK dan LAKIM	APBD	BKPSDM
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Penggunaan aplikasi LAKIM untuk penilaian kinerja ASN, tahun 2019 – 2031	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penerapan LAKIM 100%	APBD (642.000.000)	Penerapan LAKIM 100%	APBD	Penerapan LAKIM 100%	APBD	Penerapan LAKIM 100%	APBD	Penerapan LAKIM 100%	APBD	BKPSDM

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
		2. Penggunaan aplikasi SIPINTER	Pemerintahan Daerah	Penerapan SIPINTER 100%	APBD	Penerapan SIPINTER 100%	APBD	Penerapan SIPINTER 100%	APBD	Penerapan SIPINTER 100%	APBD	Penerapan SIPINTER 100%	APBD	
Sub-Dimensi: Efisiensi Kebijakan Publik														
G3. Penyusunan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk penguatan tata kelola pelayanan publik.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Diterapkannya pemanfaatan teknologi 100%	126,296,000	Diterapkannya pemanfaatan teknologi 100%	APBD	Diterapkannya pemanfaatan teknologi 100%	APBD	Diterapkannya pemanfaatan teknologi 100%	APBD	Diterapkannya pemanfaatan teknologi 100%	APBD	Balitbang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota - Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Optimalisasi SIPD, SAKIP, SIMDA, Sistem Informasi Penanganan Stunting 2. Integrasi data ekspos capaian hasil-hasil pembangunan ke website Bappeda ataupun media lainnya 3. Pembangunan peta digital potensi wilayah berbasis GIS	Persentase Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Pemanfaatan SIPD, SAKIP, SIMDA, Sistem Informasi Penanganan Stunting 100%	APBD		Data pembangunan terekspos 100%	APBD	Data pembangunan terekspos 100%	APBD		Peta digital potensi wilayah berbasis GIS	APBD	Peta digital potensi wilayah berbasis GIS

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota - Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Pengembangan Sistem SOP Pelayanan 2. Implementasi e-office untuk administrasi umum dan kearsipan 3. Pemanfaatan tanda tangan digital untuk surat menyurat 4. Pengembangan sistem permintaan surat dari masyarakat secara on-line 5. Perluasan penerapan sistem hingga ke tingkat Desa	Persentase Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	100%	6.500.000	Diterapkannya e-office	APBD	Digunakannya ttd digital	APBD	Sistem Informasi surat menyurat	APBD	80% desa memanfaatkan aplikasi e-office dan persuratan	APBD	Kec. Wolowa dan Kec. Siotapina

5.1.2 Jangka Panjang

Peta jalan Pembangunan *Smart Governance* untuk Jangka Panjang (tahun 2027 – 2031) beserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (leading sector) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
Sub-Dimensi: Peningkatan Layanan Publik														
G1. Pengembangan sistem pengelolaan dokumen pelayanan publik berbasis layanan on-line mempermudah akses masyarakat.	Peningkatan keterbukaan informasi serta aksesnya bagi masyarakat	1. Inventarisasi dan integrasi data terbuka yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat 2. Penambahan modul untuk menampilkan data terbuka pada website yang dimiliki oleh OPD	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Inventaris data terbuka Penambahan modul pada 20% OPD	APBD APBD	Integrasi data terbuka Penambahan modul pada 40% OPD	APBD APBD	 Penambahan modul pada 60% OPD	APBD APBD	 Penambahan modul pada 80% OPD	APBD APBD	 Penambahan modul pada 100% OPD	APBD APBD	Seluruh OPD yang memiliki layanan publik dan data terbuka
	Penguatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan data terbuka	1. Sosialisasi pemanfaatan data terbuka bagi masyarakat	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Pelaksanaan sosialisasi 2 kali per tahun	APBD	Pelaksanaan sosialisasi 2 kali per tahun	APBD	Pelaksanaan sosialisasi 2 kali per tahun	APBD	Pelaksanaan sosialisasi 2 kali per tahun	APBD	Pelaksanaan sosialisasi 2 kali per tahun	APBD	Seluruh OPD yang memiliki layanan publik dan data terbuka
	Pengembangan akses layanan publik berbasis kemudahan dan kecepatan	1. Inventarisasi layanan publik pada tiap OPD 2. Penyediaan akses layanan publik secara daring pada tiap	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta	50% layanan publik terdata	APBD	 100% layanan publik terdata	APBD APBD	 60% layanan publik yang	APBD APBD	 80% layanan publik yang	APBD APBD	 100% layanan publik yang	APBD APBD	Seluruh OPD yang memberikan layanan publik

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
		website yang dimiliki OPD 3. Pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk penyediaan layanan publik secara daring	secara daring			40% layanan publik yang terdata dapat diakses secara daring	APBD	terdata dapat diakses secara daring 40% layanan publik yang tersedia secara daring juga tersedia dalam aplikasi mobile	APBD	terdata dapat diakses secara daring 60% layanan publik yang tersedia secara daring juga tersedia dalam aplikasi mobile	APBD	terdata dapat diakses secara daring 80% layanan publik yang tersedia secara daring juga tersedia dalam aplikasi mobile	APBD	
	Penguatan layanan bantuan/penyelidikan non-darurat pada website OPD	1. Penyediaan layanan Help Desk pada tiap website yang dimiliki oleh OPD	10.3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	30% OPD memiliki layanan Help Desk daring	APBD	60% OPD memiliki layanan Help Desk daring	APBD	100% OPD memiliki layanan Help Desk daring	APBD	100% OPD memiliki layanan Help Desk daring	APBD	100% OPD memiliki layanan Help Desk daring	APBD	Seluruh OPD
	Peningkatan kualitas mutu	1. Penetapan kontrak layanan penyelesaian masalah di tiap OPD		50% dari OPD yang memiliki	APBD	75% dari OPD yang memiliki	APBD	100% dari OPD yang	APBD					Seluruh OPD

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	layanan penyelidikan dan penyelesaian masalah non-darurat	2. Pemantauan dan penyelesaian serta tindak lanjut untuk penyelesaian masalah non-darurat		layanan Help Desk daring memiliki kontrak penyelesaian masalah	APBD	layanan Help Desk daring memiliki kontrak penyelesaian masalah	APBD	memiliki layanan Help Desk daring memiliki kontrak penyelesaian masalah	APBD	90% masalah non-darurat terselesaikan dalam batas waktu kontrak penyelesaian masalah	APBD	90% masalah non-darurat terselesaikan dalam batas waktu kontrak penyelesaian masalah	APBD	
Perluasan dan pemerataan akses/konktivitas Internet	1. Peningkatan ketersediaan akses broadband melalui kerja sama dengan operator telekomunikasi	18.1. Persentase populasi kota dengan akses ke pita lebar (broadband)	Peningkatan cakupan akses broadband sebesar 10%	APBD, CSR	Peningkatan cakupan akses broadband sebesar 25%	APBD, CSR	Peningkatan cakupan akses broadband sebesar 50%	APBD, CSR	Peningkatan cakupan akses broadband sebesar 85%	APBD, CSR	Peningkatan cakupan akses broadband sebesar 100%	APBD, CSR	Diskominfo	

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
		2. Peningkatan ketersediaan akses broadband melalui kerja sama dengan operator telekomunikasi) berkecepatan memadai 18.2. Persentase area kota di bawah zona putih / titik mati / tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi	Penurunan persentase area titik mati konektivitas sebesar 10%	APBD, CSR	Penurunan persentase area titik mati konektivitas sebesar 25%	APBD, CSR	Penurunan persentase area titik mati konektivitas sebesar 50%	APBD, CSR	Penurunan persentase area titik mati konektivitas sebesar 85%	APBD, CSR	Penurunan persentase area titik mati konektivitas sebesar 100%	APBD, CSR	
		3. Penambahan titik hotspot publik	18.3. Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas Internet yang disediakan oleh kota	Penambahan titik hotspot publik sejumlah 10 titik	APBD, CSR	Penambahan titik hotspot publik sejumlah 20 titik	APBD, CSR	Penambahan titik hotspot publik sejumlah 30 titik	APBD, CSR	Penambahan titik hotspot publik sejumlah 40 titik	APBD, CSR	Penambahan titik hotspot publik sejumlah 50 titik	APBD, CSR	
	Peningkatan kualitas infrastruktur TI kota	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur TI kota	10.4. Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi	Peningkatan kapasitas infrastruktur TI sebesar 15%	APBD	Peningkatan kapasitas infrastruktur TI sebesar 30%	APBD	Peningkatan kapasitas infrastruktur TI	APBD	Peningkatan kapasitas infrastruktur TI	APBD	Peningkatan kapasitas infrastruktur TI	APBD	Diskominfo

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
		2. Pemanfaatan infrastruktur cloud dalam bentuk laas (Infrastructure as a Service)	informasi (TI) kota	25% infrastruktur TI kota dalam bentuk laaS	APBD	35% infrastruktur TI kota dalam bentuk laaS	APBD	sebesar 50%	APBD	sebesar 75%		sebesar 100%		
	Peningkatan kualitas layanan publik OPD	1. Penyediaan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka memiliki kontrak layanan	5.1. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka memiliki kontrak layanan	50% OPD yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka memiliki kontrak layanan	APBD	60% OPD yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka memiliki kontrak layanan	APBD	80% OPD yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka memiliki kontrak layanan	APBD	100% OPD yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka memiliki kontrak layanan	APBD	100% OPD yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka memiliki kontrak layanan	APBD	Seluruh OPD yang memiliki layanan publik dan data terbuka
Sub-Dimensi: Birokrasi Pemerintahan														
G2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan peran serta dalam	Peningkatan kesadaran masyarakat atas peran serta dalam	1. Sosialisasi, bimtek, peningkatan literasi pengajuan usulan langsung oleh masyarakat melalui SIPD ataupun sistem lainnya dalam proses Musrenbang	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat	Dilaksanakan 2 kali setahun dengan jumlah peserta seluruh perangkat	APBD	Dilaksanakan 2 kali setahun dengan jumlah peserta seluruh perangkat	APBD	Dilaksanakan 2 kali setahun dengan jumlah peserta seluruh perangkat	APBD	Dilaksanakan 2 kali setahun dengan jumlah peserta seluruh perangkat	APBD	Dilaksanakan 2 kali setahun dengan jumlah peserta seluruh	APBD	Bappeda, Kecamatan

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector		
				2027		2028		2029		2030		2031				
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber			
	kemudahan dan kecepatan	2. Pengembangan aplikasi mobile untuk pengurusan IMB 3. Integrasi data pengurusan izin bangunan dengan data kependudukan (NIK)	melalui sistem pengiriman elektronik					Terwujudnya aplikasi mobile pengajuan IMB di website Dinas PTSP	APBD			Terwujudnya integrasi data NIK dengan pengurusan izin	APBD	Terwujudnya integrasi data NIK dengan pengurusan izin	APBD	
	Peningkatan kemudahan akses layanan publik	1. Pengembangan Mall Layanan Publik Digital berbasis mobile untuk efisiensi/percepatan waktu pengurusan izin	21.3. Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari)	Inovasi dilakukan tahun 2024	Tidak ada	Inovasi dilakukan tahun 2024	Tidak ada	Terwujudnya Mall Layanan Publik Digital yang mengacu pada Mall Layanan Publik fisik	APBD	Terwujudnya Mall Layanan Publik Digital yang mengacu pada Mall Layanan Publik fisik	APBD	Terwujudnya Mall Layanan Publik Digital yang mengacu pada Mall Layanan Publik fisik	APBD	Terwujudnya Mall Layanan Publik Digital yang mengacu pada Mall Layanan Publik fisik	APBD	Dinas PTSP

5.2 Peta Jalan Pembangunan *Smart Branding*

5.2.1. Jangka Pendek dan Menengah

Peta jalan Pembangunan *Smart Branding* untuk Jangka Pendek (tahun 2022) dan Jangka Menengah (tahun 2023 – 2026) beserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (*leading sector*) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector		
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber			
Sub-Dimensi: Peningkatan Ekosistem Pariwisata																
B1. Pemetaan, peningkatan dan pemasaran potensi pariwisata yang didukung dengan promosi khususnya yang didukung teknologi informasi.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	1. Pemasaran Pariwisata secara on-line 2. Pembangunan SIMPARTA untuk dapat memfasilitasi pemesanan kamar di guest house/home stay secara online		100%	245.842.900	Pariwisata dipasarkan secara on-line	APBD			Implementasi SIMPARTA	APBD	Implementasi SIMPARTA	APBD	Implementasi SIMPARTA	APBD	Dinas Pariwisata
Sub-Dimensi: Peningkatan Daya Saing Bisnis																

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
B2. Peningkatan kegiatan pemasaran berbasis teknologi informasi yang melibatkan partisipasi dan inovasi masyarakat khususnya untuk industri kreatif.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Pengembangan Portal Perkim untuk pengajuan ijin Pemakaman		Pemanfaatan pengajuan ijin pemakaman secara online	APBD (232.722.914)	Pemanfaatan pengajuan ijin pemakaman secara online	APBD	Pemanfaatan pengajuan ijin pemakaman secara online	APBD	Pemanfaatan pengajuan ijin pemakaman secara online	APBD	Pemanfaatan pengajuan ijin pemakaman secara online	APBD	Disperkim
		2. Pengembangan Portal Perkim untuk pengajuan ijin Pembangunan Infrastruktur Desa		Pemanfaatan pengajuan ijin Pembangunan Infrastruktur Desa secara online	APBD (3.043.259.227)	Pemanfaatan pengajuan ijin Pembangunan Infrastruktur Desa secara online	APBD	Pemanfaatan pengajuan ijin Pembangunan Infrastruktur Desa secara online	APBD	Pemanfaatan pengajuan ijin Pembangunan Infrastruktur Desa secara online	APBD	Pemanfaatan pengajuan ijin Pembangunan Infrastruktur Desa secara online	APBD	Disperkim
Sub-Dimensi: Peningkatan dan Penataan Wajah Kota														
B3. Penguatan tata kelola penerapan dan konsistensi Perda tentang RTRW Kabupaten Buton	Program Pengembangan Perumahan - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1. Pembuatan Portal Perkim		Konten Portal Perkim tersiapkan	APBD (15.000.000)	Portal Perkim	APBD	Portal Perkim	APBD	Portal Perkim	APBD	Portal Perkim	APBD	Disperkim

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	Program Kabupaten/Kota													
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Integrasi informasi SIMPARTA ke Portal Perkim		Menempatkan Dokumen Publik Ke Portal Perkim (1 keg)	APBD (50.000.000)	Menempatkan Dokumen Publik Ke Portal Perkim (1 keg)	APBD	PORTAL Perkim terintegrasi dengan SIMPARTA	APBD	PORTAL Perkim terintegrasi dengan SIMPARTA	APBD	PORTAL Perkim terintegrasi dengan SIMPARTA	APBD	Disperkim
		2. Peningkatan fasilitas infrastruktur TIK di spot wisata Wabula, Dive Center Pasarwajo di tahun 2023 untuk mendukung aktivitas wisatawan		Inovasi dilakukan tahun 2023	Tidak ada	Peningkatan kualitas spot wisata	APBD	Peningkatan kualitas spot wisata	APBD	Peningkatan kualitas spot wisata	APBD	Peningkatan kualitas spot wisata	APBD	Dinas Pariwisata

5.2.2. Jangka Panjang

Peta jalan Pembangunan *Smart Branding* untuk Jangka Panjang (tahun 2027 – 2031) beserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (leading sector) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
Sub-Dimensi: Peningkatan Ekosistem Pariwisata														
B1. Pemetaan, peningkatan dan	Pengembangan potensi	1. Penyusunan paket rekreasi publik	14.1 Persentase layanan rekreasi	Tersedia nya paket rekreasi publik yang	APBD	Tersedia nya paket rekreasi publik yang	APBD	Tersedia nya paket rekreasi	APBD	Tersedia nya paket rekreasi	APBD	Tersedia nya paket rekreasi	APBD	Dinas Pariwisata

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector	
				2027		2028		2029		2030		2031			
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber		
pemasaran potensi pariwisata yang didukung dengan promosi khususnya yang didukung teknologi informasi.	pariwisata daerah		publik yang dapat dipesan secara daring	dapat diakses secara terbuka		dapat diakses secara terbuka		publik yang dapat diakses secara terbuka		publik yang dapat diakses secara terbuka		publik yang dapat diakses secara terbuka			
	Pengembangan SIMPARTA untuk mendukung pemesanan paket rekreasi publik	1. Penambahan modul pemesanan paket rekreasi publik pada SIMPARTA 2. Integrasi modul pemesanan paket rekreasi publik dengan layanan penunjang lainnya seperti akomodasi	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Inovasi dilakukan tahun 2028		Tersedianya modul pemesanan paket rekreasi publik pada SIMPARTA	APBD		APBD		Tersedianya fasilitas pemesanan akomodasi pada paket rekreasi publik	APBD	Tersedianya fasilitas pemesanan akomodasi pada paket rekreasi publik	APBD	Dinas Pariwisata
	Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai layanan	1. Sosialisasi ketersediaan layanan pemesanan daring untuk fasilitas budaya	17b.1. Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per	Ketersediaan informasi mengenai layanan pemesanan daring	APBD	Ketersediaan informasi mengenai layanan pemesanan daring	APBD	Ketersediaan informasi mengenai layanan pemesanan daring	APBD	Ketersediaan informasi mengenai layanan pemesanan daring	APBD	Ketersediaan informasi mengenai layanan pemesanan daring	APBD	Ketersediaan informasi mengenai layanan pemesanan daring	APBD

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	fasilitas budaya		100.000 penduduk											
	Penguatan proses daring untuk pemesanan fasilitas budaya	1. Penyediaan fasilitas pemesanan daring untuk fasilitas budaya multi-platform melalui media sosial ataupun marketplace	17b.1. Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	Inovasi dilakukan tahun 2028	Tidak ada	Kerja sama pemesanan fasilitas budaya secara daring dengan 1 media sosial atau marketplace	APBD	Kerja sama pemesanan fasilitas budaya secara daring dengan 3 media sosial atau marketplace	APBD	Kerja sama pemesanan fasilitas budaya secara daring dengan 5 media sosial atau marketplace	APBD	Kerja sama pemesanan fasilitas budaya secara daring dengan 5 media sosial atau marketplace	APBD	Dinas Pariwisata
	Penyediaan akses terbuka untuk catatan budaya kota dalam bentuk digital	1. Pengembangan sistem arsip digital 2. Dijitalisasi catatan budaya kota 3. Penyediaan layanan akses catatan budaya kota digital secara terbuka	17b.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Inovasi dilakukan tahun 2028	Tidak ada	Tersedianya sistem arsip digital	APBD	50% catatan budaya kota terdijitalisasi	APBD	100% catatan budaya kota terdijitalisasi 50% catatan budaya kota digital dapat diakses	APBD APBD	100% catatan budaya kota digital dapat diakses	APBD	Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
										secara terbuka		secara terbuka		

5.3 Peta Jalan Pembangunan *Smart Economy*

5.3.1. Jangka Pendek dan Menengah

Peta jalan Pembangunan *Smart Economy* untuk Jangka Pendek (tahun 2022) dan Jangka Menengah (tahun 2023 – 2026) beserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (*leading sector*) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector	
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber		
Sub-Dimensi: Peningkatan Ekosistem Industri															
Ec1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk lokal yang terintegrasi dengan penguatan peran UMKM.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan S1 Potensi Lokasi untuk Ketahanan pangan 2. Kebutuhan Peralatan Modern (Smart Alat Tani)	Tersedia Infrastruktur Penyedia Pangan	Sistem Informasi Ketahanan Pangan	APBD		Smart Alat Tani	APBD	Smart Alat Tani	APBD	Smart Alat Tani	APBD	Smart Alat Tani	APBD	Dinas Pertanian

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Pengembangan SI Penyuluhan Pertanian 2. Pengadaan alat pemantau tanaman berbasis Drone (Jangka Menengah sampai tahap FS)	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	SI Penyuluhan Pertanian	APBD									Dinas Pertanian
						Ketersediaan alat pemantau tanaman berbasis Drone	APBD	Ketersediaan alat pemantau tanaman berbasis Drone	APBD	Ketersediaan alat pemantau tanaman berbasis Drone	APBD	Ketersediaan alat pemantau tanaman berbasis Drone	APBD	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1. Pembangunan SI - untuk Pelaporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sistem Informasi Pelaporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	APBD	Sistem Informasi Pelaporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	APBD	Sistem Informasi Pelaporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	APBD	Sistem Informasi Pelaporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	APBD	Sistem Informasi Pelaporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	APBD	Dinas Pertanian
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu)	1. Pengembangan Sistem Informasi Toko Penjual Bahan (pengembangan yg sdh ada).	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1	Inovasi dilakukan tahun 2026	Tidak ada	Inovasi dilakukan tahun 2026	Tidak ada	Inovasi dilakukan tahun 2026	Tidak ada	Inovasi dilakukan tahun 2026	Tidak ada	Sistem Informasi Toko Penjual Bahan	APBD	Dinas Pertanian

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	Daerah Kabupaten /Kota Lain		(satu) daerah Kab/Kota lain											
Sub-Dimensi: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat														
Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1. Pengembangan Aplikasi yang bersifat "Penyampaian Informasi Perihal Kegiatan Dinas KP" 2. Membuat Kegiatan Sentralisasi Data	Jumlah data ketersediaan energi dan protein (Neraca Bahan Makanan)	Tersedianya aplikasi 100%	APBD									Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	1. Otomasi Aplikasi untuk mengotomasi Proses Informasi Harga Pangan (Kelanjutan Sentralisasi Data)	Jumlah Analisis Harga Pangan Lokal	Aplikasi terotomasi 100%	APBD	Aplikasi terotomasi 100%	APBD	Aplikasi terotomasi 100%	APBD	Aplikasi terotomasi 100%	APBD	Aplikasi terotomasi 100%	APBD	Dinas Ketahanan Pangan

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	Kab/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan													
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	1. Pembangunan Aplikasi untuk Pemantauan Kerawanan Pangan	Jumlah kawasan mandiri pangan	Tersedia Aplikasi untuk Pemantauan Kerawanan Pangan	APBD	Tersedia Aplikasi untuk Pemantauan Kerawanan Pangan	APBD	Tersedia Aplikasi untuk Pemantauan Kerawanan Pangan	APBD	Tersedia Aplikasi untuk Pemantauan Kerawanan Pangan	APBD	Tersedia Aplikasi untuk Pemantauan Kerawanan Pangan	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Sub-Dimensi: Pengembangan Ekosistem Transaksi Keuangan														
Ec3. Pembangunan ekosistem investasi usaha yang memberikan kemudahan akses pembiayaan khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat	Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Pembuatan Sistem Layanan dan Informasi Tentang Koperasi dan UMKM	Presentase Koperasi Aktif	Tersedianya Sistem Layanan dan Informasi Koperasi dan UMKM	APBD	Tersedianya Sistem Layanan dan Informasi Koperasi dan UMKM	APBD	Tersedianya Sistem Layanan dan Informasi Koperasi dan UMKM	APBD	Tersedianya Sistem Layanan dan Informasi Koperasi dan UMKM	APBD	Tersedianya Sistem Layanan dan Informasi Koperasi dan UMKM	APBD	Dinas Koperasi UKM
	Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Pembuatan Sistem Informasi Monev Koperasi - Melalui Media Sosial atau Web Dinas 2. Pembuatan aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil	Cakupan Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam	100%	APBD	Pembuatan Sistem Informasi Monev Koperasi	APBD			Aplikasi Pencatatan	APBD	Aplikasi Pencatatan	APBD	Dinas Koperasi UKM

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
t dengan kemampuan ekonomi rendah.		output dari Sistem Penilaian						Pengawasan		Pengawasan		Pengawasan		
	Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Pembentukan unit Koperasi Baru 2. Pengembangan Sistem Layanan Perijinan Koperasi Oleh Pengusul. Layanan Sistem Perijinan UMKM berbasis Web. (PJ Entry Data di Kecamatan)	Pembentukan Koperasi Baru	1 paket	APBD	Sistem Layanan Perijinan Koperasi Oleh Pengusul	APBD	Sistem Layanan Perijinan Koperasi Oleh Pengusul	APBD	Sistem Layanan Perijinan Koperasi Oleh Pengusul	APBD	Sistem Layanan Perijinan Koperasi Oleh Pengusul	APBD	Dinas Koperasi UKM
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah/Kabupaten /Kota	1. Pembuatan Sistem Informasi Monev Koperasi - Melalui Media Sosial atau Web Dinas 2. Pembuatan aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil output dari Sistem Penilaian	Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah/K	Sistem Informasi Monev Koperasi - Melalui Media Sosial atau Web Dinas	APBD	Aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil output dari Sistem Penilaian	APBD	Aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil output dari Sistem Penilaian	APBD	Aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil output dari Sistem Penilaian	APBD	Aplikasi Pencatatan Pengawasan - hasil output dari Sistem Penilaian	APBD	Dinas Koperasi UKM

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector		
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber			
			abupaten /Kota													
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Membuat Sistem Informasi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi - Melalui Media Sosial atau Web Dinas 2. Aktifasi dan pengembangan SIDajul	Jumlah Unit Pasar yang terbangun (Unit)	Sistem Informasi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	APBD	Sistem Informasi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	APBD			SIDajul aktif kembali	APBD	SIDajul aktif kembali	APBD	SIDajul aktif kembali	APBD	Dinas Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana	1. Pengembangan Sistem Penataan tempat usaha - Pendataan, Alokasi, dll	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Inovasi dilakukan tahun 2023	Tidak ada	Pengembangan Sistem Penataan tempat usaha - Pendataan, Alokasi, dll	APBD	Pengembangan Sistem Penataan tempat usaha - Pendataan, Alokasi, dll	APBD	Pengembangan Sistem Penataan tempat usaha - Pendataan, Alokasi, dll	APBD	Pengembangan Sistem Penataan tempat usaha - Pendataan, Alokasi, dll	APBD	Pengembangan Sistem Penataan tempat usaha - Pendataan, Alokasi, dll	APBD	Dinas Perdagangan
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pengembangan Aplikasi Pencatatan Tera Ulang	Jumlah Data UTPP Kemetrol ogian Daerah	Inovasi dilakukan tahun 2024	Tidak ada	Inovasi dilakukan tahun 2024	Tidak ada	Aplikasi Pencatatan Tera Ulang	APBD	Aplikasi Pencatatan Tera Ulang	APBD	Aplikasi Pencatatan Tera Ulang	APBD	Aplikasi Pencatatan Tera Ulang	APBD	Dinas Perdagangan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi	1. Pengembangan Aplikasi Pengarsipan Dokumen Digital	Penyusunan dan evaluasi rencana	Inovasi dilakukan tahun 2024	Tidak ada	Aplikasi Pengarsipan Dokumen Digital	APBD	Aplikasi Pengarsipan	APBD	Aplikasi Pengarsipan	APBD	Aplikasi Pengarsipan	APBD	Aplikasi Pengarsipan	APBD	Dinas Perindustrian

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	Industri Nasional		pembangunan Industri kabupaten/kota					Dokumen Digital		Dokumen Digital		Dokumen Digital		
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Optimalisasi Blog Dinas (Penambahan Fitur Permintaan Info ttg pembukaa IKM, dll) – SIINas 1. Pengembangan Aplikasi - untuk pendaftaran IKM	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya pemahaman masyarakat	APBD			Implementasi aplikasi pendaftaran IKM	APBD	Implementasi aplikasi pendaftaran IKM	APBD	Implementasi aplikasi pendaftaran IKM	APBD	Dinas Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1. Pengembangan Sistem Pendataan Industri-Pendaftaran s/d Keluar SK	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Lingkup kabupaten	Inovasi dilakukan tahun 2024	Tidak ada	Inovasi dilakukan tahun 2024	Tidak ada	Sistem Pendataan Industri-Pendaftaran s/d Keluar SK	APBD	Sistem Pendataan Industri-Pendaftaran s/d Keluar SK	APBD	Sistem Pendataan Industri-Pendaftaran s/d Keluar SK	APBD	Dinas Perindustrian

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
			n/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)											

5.3.2. Jangka Panjang

Peta jalan Pembangunan *Smart Economy* untuk Jangka Panjang (tahun 2027 – 2031) beserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (*leading sector*) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
Sub-Dimensi: Peningkatan Ekosistem Industri														
Ec1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk lokal yang terintegrasi dengan penguatan peran UMKM.	Program Penguatan SDM	1. Pelatihan	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk (Total penduduk < dari 100 ribu)	Program Pengolahan Hasil Laut	APBD	Program Pengolahan Tenun	APBD	Program Pengolahan Anyaman	APBD	Program	APBD	Program	APBD	Dinas Perindustrian
		2. Pengadaan Fasilitas/SarPras		Kegiatan Pengadaan Fasilitas/SarPras	DAK	Kegiatan Pengadaan Fasilitas/SarPras	DAK	Kegiatan Pengadaan	DAK	Kegiatan Pengadaan	DAK	Kegiatan Pengadaan	DAK	

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
								Fasilitas/SarPras		Fasilitas/SarPras		Fasilitas/SarPras		
	Program Penguatan Tata Kelola	1. Pengembangan Sistem Informasi Peta Industri dan SDM TIK	Keterbukaan Layanan Informasi dan Data	SDM TIK dan Masterplan	APBD	Pengembangan Aplikasi	APBD	Implementasi dan Sosialisasi	APBD	Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	APBD		APBD	Dinas Perindustrian
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat														
Ec2. Peningkatan kemampuan produk usaha lokal untuk mendukung terbukanya lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Program Perluasan Lahan Produksi	1. Perluasan Lahan Produksi	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Produksi Tanaman Pangan bertambah) (Ha) : Ubi Kayu	APBN APBD	Produksi Tanaman Pangan bertambah) (Ha) : Ubi Kayu	APBN APBD	Produksi Tanaman Pangan bertambah) (Ha) : Ubi Kayu	APBN APBD	Produksi Tanaman Pangan bertambah) (Ha) : Ubi Kayu	APBN APBD	Produksi Tanaman Pangan bertambah) (Ha) : Ubi Kayu	APBN APBD	Dinas Ketahanan Pangan
			Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Pemanfaatan Pekarangan Rumah ; Kebun ; Pengolahan Pasca Panen ;	APBN APBD	Pemanfaatan Pekarangan Rumah ; Kebun ; Pengolahan Pasca Panen ;	APBN APBD	Pemanfaatan Pekarangan Rumah ; Kebun ; Pengolahan Pasca Panen ;	APBN APBD	Pemanfaatan Pekarangan Rumah ; Kebun ; Pengolahan Pasca Panen ;	APBN APBD	Pemanfaatan Pekarangan Rumah ; Kebun ; Pengolahan Pasca Panen ;	APBN APBD	Pemanfaatan Pekarangan Rumah ; Kebun ; Pengolahan Pasca Panen ;
Sub-Dimensi: Membangun Ekosistem Keuangan														
Ec3. Pembangunan ekosistem	Program Penguatan Sektor	1. Program Pengembangan. Sektor Industri Pangan, Produk	Tingkat kelangsungan bisnis baru per	Program Pengolahan Hasil Laut	APBD	Program Pengolahan Tenun	APBD	Program Pengolahan Anyaman	APBD	Program	APBD	Program	APBD	Dinas Perindustrian

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
investasi usaha yang memberikan kemudahan akses pembiayaan khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah.	Perindustrian Daerah	Rumahan, Pengolahan Hasil laut)	100.000 penduduk (Total penduduk < dari 100 ribu)	Kegiatan Pengadaan Fasilitas/SarPras	DAK	Kegiatan Pengadaan Fasilitas/SarPras	DAK	Kegiatan Pengadaan Fasilitas/SarPras	DAK	Kegiatan Pengadaan Fasilitas/SarPras	DAK	Kegiatan Pengadaan Fasilitas/SarPras	DAK	Dinas Perindustrian

5.4 Peta Jalan Pembangunan *Smart Living*

5.4.1. Jangka Pendek dan Menengah

Peta jalan Pembangunan *Smart Living* untuk Jangka Pendek (tahun 2022) dan Jangka Menengah (tahun 2023 – 2026) beserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (*leading sector*) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
peningkatan kualitas layanan kesehatan, kapasitas SDM kesehatan, dan juga layanan fasilitas kesehatan.	Program Penguatan Tata Kelola Layanan Kesehatan	1. Pengembangan dan optimalisasi SIKDA Generik DAN ASPaK		Sudah memiliki SIKDA Generik DAN ASPaK (sinkronisasi daerah dan pusat)	APBD	Sudah memiliki SIKDA Generik DAN ASPaK (sinkronisasi daerah dan pusat)	APBD	Sudah memiliki SIKDA Generik DAN ASPaK (sinkronisasi daerah dan pusat)	APBD	Sudah memiliki SIKDA Generik DAN ASPaK (sinkronisasi daerah dan pusat)	APBD	Sudah memiliki SIKDA Generik DAN ASPaK (sinkronisasi daerah dan pusat)	APBD	Dinkes
	Program Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1. Integrasi dengan Sistem Informasi Layanan RS	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	25,549,369,508	Integrasi dengan SI - Layanan RS	APBD/ DAK	Integrasi dengan SI - Layanan RS	APBD/ DAK	Integrasi dengan SI - Layanan RS	APBD/ DAK	Integrasi dengan SI - Layanan RS	APBD/ DAK	RSUD
Sub-Dimensi: Ketersediaan Sarana - Prasarana Transportasi														
L3. Pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan mendukung mobilitas	Program Penyediaan Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	1. Pengembangan Aplikasi Pencatatan Aset Perhubungan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Ideal	100%	2219999350	Tersedianya Aplikasi Pencatatan Aset Perhubungan	APBD	Tersedianya Aplikasi Pencatatan Aset Perhubungan	APBD	Tersedianya Aplikasi Pencatatan Aset Perhubungan	APBD	Tersedianya Aplikasi Pencatatan Aset Perhubungan	APBD	Dishub
	Program Penyediaan	1. Pengembangan Sistem Informasi BD		100%	99999700	Tersedianya Sistem Informasi BD	APBD	Tersedianya Sistem Informasi BD	APBD	Tersedianya Sistem Informasi BD	APBD	Tersedianya Sistem Informasi BD	APBD	Dishub

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
masyarakat antar wilayah secara efisien.	Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	pencatatan Aset - Program Buton Terang			pencatatan Aset - Program Buton Terang		Informasi BD pencatatan Aset - Program Buton Terang		Informasi BD pencatatan Aset - Program Buton Terang		Informasi BD pencatatan Aset - Program Buton Terang			
	Program Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Pembuatan Informasi Pembangunan Gedung Terminal - Fasilitas yang ada, dll Melalui Media Sosial atau Web Dinas		Tersedia nya Sistem Informasi 100%	APBD	Tersedia nya Sistem Informasi 100%	APBD	Tersedia nya Sistem Informasi 100%	APBD	Tersedia nya Sistem Informasi 100%	APBD	Tersedia nya Sistem Informasi 100%	APBD	Dishub
	Program Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Pengembangan SI Pelabuhan Sungai dan Danau - memiliki fitur pemesanan tiket, dll	Jumlah Terminal/Dermaga/Pelabuhan Laut	Inovasi dilakukan tahun 2023	Tidak ada	Adanya SI Pelabuhan Sungai dan Danau - memiliki fitur pemesanan tiket, dll	APBD / 22.400.000 .000	Adanya SI Pelabuhan Sungai dan Danau - memiliki fitur pemesanan tiket, dll	APBD	Adanya SI Pelabuhan Sungai dan Danau - memiliki fitur pemesanan tiket, dll	APBD	Adanya SI Pelabuhan Sungai dan Danau - memiliki fitur pemesanan tiket, dll	APBD	Dishub

5.4.2. Jangka Panjang

Peta jalan Pembangunan *Smart Living* untuk Jangka Panjang (tahun 2027 – 2031) berserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (*leading sector*) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
Sub-Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang														
L1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan yang layak dan didukung sarpras serta utilitas yang memadai.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	1. Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar	Penyaluran air bersih masing-masing 200 rumah tingkat desa	APBN	Penyaluran air bersih di 150 rumah tingkat desa	APBN	Penyaluran air bersih di 100 rumah tingkat desa	APBN	Penyaluran air bersih di 50 rumah tingkat desa	APBN	Penyaluran air bersih di seluruh rumah di Kab Buton	APBN	Disperkim
		2. Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar	Pemenuhan kebutuhan listrik bagi MBR (masing-masing kecamatan) 20%	APBD	Pemenuhan kebutuhan listrik bagi MBR (masing-masing kecamatan) 40%	APBD	Pemenuhan kebutuhan listrik bagi MBR (masing-masing kecamatan) 60%	APBD	Pemenuhan kebutuhan listrik bagi MBR (masing-masing kecamatan) 80%	APBD	Pemenuhan kebutuhan listrik bagi MBR (masing-masing kecamatan) 100%	APBD	PLN dan Disperkim sebagai penyambung/SR
		3. Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus	Tersedianya ruang terbuka hijau ramah difable (1 titik lokasi) 100%	APBD	Tersedianya ruang terbuka hijau ramah difable (1 titik lokasi) 100%	APBD	Tersedianya ruang terbuka hijau ramah difable (1 titik lokasi) 100%	APBD	Tersedianya ruang terbuka hijau ramah difable (1 titik lokasi) 100%	APBD	Tersedianya ruang terbuka hijau ramah difable (1 titik lokasi) 100%	APBD	Disperkim
Sub-Dimensi: Mewujudkan Sarana -Prasarana Kesehatan														
L2. Pengembangan sistem layanan	Program Peningkatan Fasilitas dan	1. Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan	Persentase populasi kota yang masuk dalam file	Sosialisasi terkait aplikasi kunjung ibu hamil	APBD (50.000.000)	Pendataan ibu hamil dan sinkronisasi data dengan	APBD / DAK (140.000.000)	Cakupan persentase ibu hamil yang	DAK Non Fisik / BOK Puskesmas (350.000.000)	Cakupan persentase ibu hamil yang	DAK Non Fisik / BOK Puskesmas (350.000.000)	Cakupan persentase ibu hamil yang	DAK Non Fisik / BOK Puskesmas	Dinkes

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
kesehatan yang terintegrasi untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, kapasitas SDM kesehatan, dan juga layanan fasilitas kesehatan.	Pelayanan Kesehatan	tingkat kabupaten/kota 2. Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	kepada masyarakat 100%		aplikasi kunjung ibu hamil (1.126 per September 2021) 100%		terlayani melalui aplikasi aplikasi kunjung ibu hamil sebanyak 30%		terlayani melalui aplikasi aplikasi kunjung ibu hamil sebanyak 60%		terlayani melalui aplikasi aplikasi kunjung ibu hamil sebanyak 100%	(350.000.000)	
			Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Kerjasama dengan OPD terkait ambulance pintar 100%	APBD	Penyiapan aplikasi Ambulance Pintar 100%	APBD	Sosialisasi Aplikasi Ambulance Pintar 100%	APBD	Penyediaan sumberdaya/SDM kesehatan ambulance pintar 100%	APBD	Penerbitan Peraturan Bupati tentang Ambulance Pintar 100%	APBD	APBD
Sub-Dimensi: Ketersediaan Sarana - Prasarana Transportasi														
L3. Pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan mendukung mobilitas masyarakat	Program Penetapan Rencana Induk Perhubungan	1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu	Penertiban dan Penyusunan Organda sebagai penyedia angkutan di daerah	APBD	Penyusunan Mou dengan pihak terkait dalam penerapan Aplikasi Trans Buton	APBD	Sosialisasi Aplikasi Trans Buton	APBD	Sosialisasi Aplikasi Trans Buton	APBD	Sosialisasi Aplikasi Trans Buton	APBD	Dishub
			Persentase rute angkutan	Inovasi dilakukan tahun 2030	Tidak ada	Inovasi dilakukan tahun 2030	Tidak ada	Inovasi dilakuka	Tidak ada	Implementasi penerapa	APBD	Pengembangan Trayek	APBD	Dishub

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
t antar wilayah secara efisien.		(satu) daerah kabupaten/kota	umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter					n tahun 2030		n Aplikasi Trans Buton		dan rute ke Obyek Wisata via Aplikasi Trasn Buton		
	Program Penyediaan Perengkapan Jalan	1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	Penentuan titik lokasi melalui studi kelayakan pemasangan lampu lalu lintas cerdas 100%	APBD	Penyusunan AMDAL dan DED Lampu Lalu lintas cerdas 100%	APBN & APBD	Pemasangan Rambu Lalulintas Cerdas di lokasi Strategis 100%	APBN & APBD	Sosialisasi Lampu Lalu Lintas Cerdas kepada masyarakat 100%	APBD	Penerbitan Perda Terkait Peraturan Lalu Lintas Cerdas Kabupaten Buton 100%	APBD	Dishub

5.5 Peta Jalan Pembangunan *Smart Society*

5.5.1. Jangka Pendek dan Menengah

Peta jalan Pembangunan *Smart Society* untuk Jangka Pendek (tahun 2022) dan Jangka Menengah (tahun 2023 – 2026) beserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (*leading sector*) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	Masyarakat Desa	2. Penyediaan konten digital pelatihan masyarakat desa	yang terbina (Kelompok) Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang	Konten Digital Pelatihan yang ditempatkan di Portal DPMD (90%)	APBD (94.333.660)	Konten Digital Pelatihan yang ditempatkan di Portal DPMD (90%)	APBD	Konten Digital Pelatihan yang ditempatkan di Portal DPMD (90%)	APBD	Konten Digital Pelatihan yang ditempatkan di Portal DPMD (90%)	APBD	Konten Digital Pelatihan yang ditempatkan di Portal DPMD (90%)	APBD	Dinas PMD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa → Tata Naskah Menggunakan SRIKANDI dari Kominfo	terlaksana (Desa)	SRIKANDI dapat digunakan	APBD	SRIKANDI dapat digunakan	APBD	SRIKANDI dapat digunakan	APBD	SRIKANDI dapat digunakan	APBD	SRIKANDI dapat digunakan	APBD	Dinas PMD
	Program Pemberdayaan Sosial	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota → Pengembangan Portal Dinsos untuk Pengaduan, Usulan Bantuan Masyarakat, dan Inf Dinsos	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Pengaduan, Usulan Bantuan Masyarakat, dan Inf Dinsos Melalui Portal dinsos.butonkab.go.id	APBD (365.000.000)	Pengaduan, Usulan Bantuan Masyarakat, dan Inf Dinsos Melalui Portal dinsos.butonkab.go.id	APBD	Pengaduan, Usulan Bantuan Masyarakat, dan Inf Dinsos Melalui Portal dinsos.butonkab.go.id	APBD	Pengaduan, Usulan Bantuan Masyarakat, dan Inf Dinsos Melalui Portal dinsos.butonkab.go.id	APBD	Pengaduan, Usulan Bantuan Masyarakat, dan Inf Dinsos Melalui Portal dinsos.butonkab.go.id	APBD	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	1. Pengembangan aplikasi SIGADISDESA -> Sistem Integrasi Data	Persentase PMKS yang	100%	APBD (60.000.000)	100%	APBD	100%	APBD	100%	APBD	100%	APBD	Dinas Sosial

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
		Kemiskinan Desa /Kelurahan, 2. Pengembangan Aplikasi WEB Pendataan Masyarakat Miskin 3. Integrasi dengan Portal DINKES	direhabilitasi	100%	APBD (10.000.000)	100%	APBD	100%	APBD	100%	APBD	100%	APBD	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota → Integrasi dengan data NIK Disdukcapil	Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantornya	Integrasi dengan Disdukcapil	APBD (200.000.000)	Integrasi dengan Disdukcapil	APBD	Integrasi dengan Disdukcapil	APBD	Integrasi dengan Disdukcapil	APBD	Integrasi dengan Disdukcapil	APBD	Dinsos
Sub-Dimensi: Mewujudkan Ekosistem Belajar														
S2. Penguatan infrastruktur pendidikan vokasi yang fokus pada bidang pariwisata, kesehatan, keagamaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Pembuatan Portal Dispend + Konten Dinas Pendidikan U/ PAUD, SD, SMP 2. Pengembangan LMS untuk SMP	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Portal Dispend + Konten Dinas Pendidikan U/ PAUD, SD, SMP	APBD (2.797.028.000)									Dinas Pendidikan
						LMS untuk SMP	APBD	LMS untuk SMP	APBD	LMS untuk SMP	APBD	LMS untuk SMP	APBD	

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
dan teknologi informasi serta didukung dengan pemberian beasiswa.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1. Pembangunan Sistem Pelaporan Dan BOS melalui Portal (pusat dan daerah)	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sistem Pelaporan melalui Portal (pusat dan daerah)	APBD	Sistem Pelaporan melalui Portal (pusat dan daerah)	APBD	Sistem Pelaporan melalui Portal (pusat dan daerah)	APBD	Sistem Pelaporan melalui Portal (pusat dan daerah)	APBD	Sistem Pelaporan melalui Portal (pusat dan daerah)	APBD	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	1. Implementasi Sistem Informasi Digital Library (SLIMS)	Jumlah Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah yang Diadakan (Eksemplar)	Launching Digital Library (SLIMS)	APBD	Implementasi Digital Library (SLIMS)	APBD	Implementasi Digital Library (SLIMS)	APBD	Implementasi Digital Library (SLIMS)	APBD	Implementasi Digital Library (SLIMS)	APBD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub-Dimensi: Mewujudkan Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat														
S3. Pengembangan sistem layanan kegawatdauran dan keselamatan masyarakat berbasis	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran Penyusunan Norma, standar, prosedur	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat → Pengembangan Portal DAMKAR	Jumlah wilayah keg. Sosialisasi	Persiapan Konten Damkar (Konten Digital Pada Portal Damkar)	APBD	Portal DAMKAR berfungsi 100%	APBD	Portal DAMKAR berfungsi 100%	APBD	Portal DAMKAR berfungsi 100%	APBD	Portal DAMKAR berfungsi 100%	APBD	DAMKAR

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
		Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (melalui Portal) DPPKB		Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (melalui Portal) DPPKB		unan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (melalui Portal) DPPKB		unan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (melalui Portal) DPPKB		unan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (melalui Portal) DPPKB		
	2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2. Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya peta Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	APBD	Terwujudnya peta Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	APBD	Terwujudnya peta Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	APBD	Terwujudnya peta Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	APBD	Terwujudnya peta Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	APBD	

5.5.2. Jangka Panjang

Peta jalan Pembangunan *Smart Society* untuk Jangka Panjang (tahun 2027 – 2031) beserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (*leading sector*) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
Sub-Dimensi: Interaksi Masyarakat yang Efisien														
S1. Peningkatan peran masyarakat dalam mendukung usaha untuk merealisasikan ekosistem komunikasi yang smart.	Program Administrasi Pemerintahan Desa, sub Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	1. Pembangunan perpustakaan di desa.	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	3 Perpus	APBD + APBD Propinsi + APBN + Anggaran Perpusnas + Dana Desa	3 Perpus	APBD + APBD Propinsi + APBN + Anggaran Perpusnas + Dana Desa	3 Perpus	APBD + APBD Propinsi + APBN + Anggaran Perpusnas + Dana Desa	3 Perpus	APBD + APBD Propinsi + APBN + Anggaran Perpusnas + Dana Desa	5 Perpus	APBD + APBD Propinsi + APBN + Anggaran Perpusnas + Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub-Dimensi: Mewujudkan Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat														
S3. Pengembangan sistem layanan kegawatduran dan keselamatan masyarakat berbasis teknologi informasi yang didukung dengan	Program Pembinaan Perpustakaan, Sub Pengembangan bahan pustaka	1. Pengembangan bahan pustaka berbentuk koleksi digital/elektronik	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	Pengadaan Bahan pustaka 25.000 koleksi	APBD + DAK	Pengadaan Bahan pustaka 50.000 koleksi	APBD + DAK	Pengadaan Bahan pustaka 75.000 koleksi	APBD + DAK	Pengadaan Bahan pustaka 150.000 koleksi	APBD + DAK	Pengadaan Bahan pustaka 200.000 koleksi	APBD + DAK	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Daerah
	Program Pembinaan Perpustakaan, sub Sosialisasi Budaya baca dan literasi	1. Peningkatan sistem distribusi dan pengelolaan bantuan perpustakaan	17.4. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan	5000 penerima manfaat	APBD + APBD Propinsi + APBN Anggaran Perpusnas	10000 penerima manfaat	APBD + APBD Propinsi + APBN Anggaran Perpusnas	15000 penerima manfaat	APBD + APBD Propinsi + APBN Anggaran Perpusnas	20000 penerima manfaat	APBD + APBD Propinsi + APBN Anggaran Perpusnas	25000 penerima manfaat	APBD + APBD Propinsi + APBN Anggaran Perpusnas	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Daerah

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
penguatan tenaga layanan keselamatan.	pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat		an umum yang aktif											
	Koordinasi dengan OPD Lain dan Polres	1. Identifikasi dan pemasangan Smart CCTV untuk penanganan titik rawan kebakaran	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	5 titik potensi kebakaran	APBN + APBD	5 titik potensi kebakaran	APBN + APBD	5 titik potensi kebakaran	APBN + APBD	5 titik potensi kebakaran	APBN + APBD	5 titik potensi kebakaran	APBN + APBD	DAMKAR

5.6 Peta Jalan Pembangunan *Smart Environment*

5.6.1. Jangka Pendek dan Menengah

Peta jalan Pembangunan *Smart Environment* untuk Jangka Pendek (tahun 2022) dan Jangka Menengah (tahun 2023 – 2026) beserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (*leading sector*) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
Sub-Dimensi: Proteksi Lingkungan														
En1. Penguatan pengawasan terhadap berbagai kegiatan usaha yang memiliki potensi/dampak pencemaran lingkungan .	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	1. Pembangunan Portal Informasi Pol PP yang interaktif	Cakupan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persiapan Konten Portal PP (100%)	APBD (100.000.000)	Implementasi Portal PP (PORTAL POSPP)	APBD	Pemeliharaan Portal PP (PORTAL POSPP)	APBD	Pemeliharaan Portal PP (PORTAL POSPP)	APBD	Pemeliharaan Portal PP (PORTAL POSPP)	APBD	Satpol PP
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota → Penambahan modul pelaporan pencemaran pada Portal DLH	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL & SPPL	Portal DLH (95%)	APBD	Portal DLH (100%)	APBD	Portal DLH (100%)	APBD	Portal DLH (100%)	APBD	Portal DLH (100%)	APBD	DLH
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	1. Integrasi Modul Pelaporan pada Portal DLH dengan sistem pelaporan/pengaduan masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Lingkungan (%)	Portal LH + Modul Pelaporan Masyarakat (75%)	APBD (74.954.920)	Portal LH + Modul Pelaporan Masyarakat (100%)	APBD	Portal LH + Modul Pelaporan Masyarakat (100%)	APBD	Portal LH + Modul Pelaporan Masyarakat (100%)	APBD	Portal LH + Modul Pelaporan Masyarakat (100%)	APBD	DLH

Strategi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator RPJMD	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3): Penyimpanan Sementara Limbah B3	1. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL & SPPL	Terwujudnya Sistem Informasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (90%)	APBD (39.095.040)	Terwujudnya Sistem Informasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (100%)	APBD	Terwujudnya Sistem Informasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (100%)	APBD	Terwujudnya Sistem Informasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (100%)	APBD	Terwujudnya Sistem Informasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (100%)	APBD	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1. Pemanfaatan Portal DLH untuk Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL & SPPL	Portal Penanganan Aduan 95%	APBD (38.171.520)	Portal Penanganan Aduan 100%	APBD	Portal Penanganan Aduan 100%	APBD	Portal Penanganan Aduan 100%	APBD	Portal Penanganan Aduan 100%	APBD	DLH

5.6.2. Jangka Panjang

Peta jalan Pembangunan *Smart Environment* untuk Jangka Panjang (tahun 2027 – 2031) beserta informasi mengenai inovasi dan program/kegiatan/sub-kegiatan yang menjadi acuan pada RPJMD/Renstra OPD dilengkapi dengan OPD yang menjadi penanggung jawab utama (*leading sector*) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Inovasi	Program/Kegiatan (RPJMD)	Inovasi Smart City	Indikator SNI 37122	Target Kinerja/Anggaran (rencana sumber pendanaan)										OPD Leading Sector
				2027		2028		2029		2030		2031		
				Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	Target	Sumber	
Sub-Dimensi: Proteksi Lingkungan														
En1. Penguatan pengawasan terhadap berbagai kegiatan usaha yang memiliki potensi/ dampak pencemaran lingkungan .	Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan 2. Pengembangan Sistem Informasi pemantauan jaringan pipa air limbah	22.5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking real-time	Pemberlakuan Aturan dan Regulasi dan 20% Pelaku Usaha intensif melaporkan Air Limbah secara online melalui Sistem	CSR + DAU +DAK	30% Pelaku Usaha intensif melaporkan Air Limbah secara online melalui Sistem	CSR + DAU +DAK	50% Pelaku Usaha intensif melaporkan Air Limbah secara online melalui Sistem	CSR + DAU +DAK	80% Pelaku Usaha intensif melaporkan Air Limbah secara online melalui Sistem	CSR + DAU +DAK	Studi pengembangan Peralatan Monitoring air Limbah Online berdasarkan Data Pelaporan	CSR + DAU +DAK + APBN	DLH

BAB VI PENUTUP

Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pembangunan *Smart City* di Kabupaten Buton dalam rangka Gerakan *Smart City* Nasional di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan kolaborasi bersama Kementerian dan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia, serta peran aktif berbagai pihak lain.

Masterplan *Smart City* ini diharapkan dapat menjadi pemandu arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program *smart city* di Kabupaten Buton, juga sebagai panduan bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pelaksanaan *smart city* di Kabupaten Buton. Dalam pelaksanaannya, sangat dimungkinkan adanya revisi dari tahun ke tahun oleh Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* sesuai dengan perkembangan situasi dan teknologi. Hal tersebut diharapkan dapat memperkaya proses pengembangan *smart city* di Kabupaten Buton. Segala masukan dan informasi dari masyarakat sangat kami harapkan, demi untuk memperbaiki Masterplan *Smart City* Kabupaten Buton ini dari tahun ke tahun.

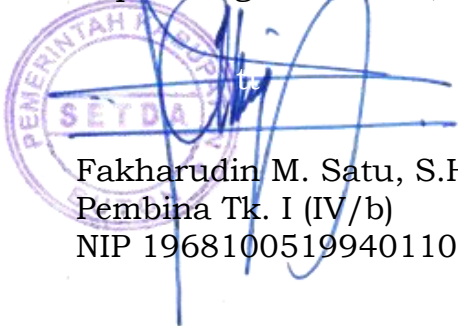
Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

